



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP berbasis Akrua. Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama Tahun Anggaran 2017.

LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
- n. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi; dan
- o. Peraturan Walikota Balikpapan No. 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

- | | |
|------|---|
| 4.2. | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| 4.3. | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- | | | |
|-----------------------|--|---------------|
| 5.1. | Laporan Realisasi Anggaran | |
| 5.1.1. | | Pendapatan |
| LRA | | |
| 5.1.2. | | Belanja |
| 5.1.3. | | Transfer |
| 5.1.4. | | Pembiayaan |
| 5.2. | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) | |
| 5.2.1. | | Perubahan |
| SAL | | |
| 5.3. | Neraca | |
| 5.3.1. | | Aset |
| 5.3.2. | | Kewajiban |
| 5.3.3. | | Ekuitas |
| 5.4. | Laporan Operasional (LO) | |
| 5.4.1. | | Pendapatan |
| LO | | |
| 5.4.2. | | Beban |
| 5.4.3. | | Kegiatan Non |
| Operasional | | |
| 5.4.4. | | Pos Luar |
| Biasa | | |
| 5.5. | Laporan Arus Kas | |
| 5.5.1. | | Arus Kas dari |
| Aktivitas Operasi | | |
| 5.5.2. | | Arus Kas dari |
| Aktivitas Investasi | | |
| 5.5.3. | | Arus Kas dari |
| Aktivitas Pendanaan | | |
| 5.5.4. | | Arus Kas dari |
| Aktivitas Transitoris | | |
| 5.6. | Laporan Perubahan Ekuitas | |
| 5.6.1. | | Perubahan |
| Ekuitas | | |
| 5.7. | Pengungkapan Informasi Lainnya | |

Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **“Mewujudkan Kota Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur/Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

Dalam tahun 2017 APBD disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sangat dipengaruhi dengan kondisi dan posisi keuangan tahun 2017. Implementasi kebijakan keuangan erat kaitannya dengan posisi saldo kas yang dicerminkan dalam Laporan Arus Kas maupun Neraca Pemerintah Kota Balikpapan.

Berikut dijelaskan beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

- a. Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2017 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp1.938.309.743.312,00 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp227.891.480.572,09. Penerimaan pendapatan direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp568.575.283.786,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.367.134.459.526,00 dan dari Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah sebesar Rp2.600.000.000,00.
- b. Pengeluaran Daerah dibagi kedalam tiga bagian yaitu Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2.022.018.424.820,00 yang dibagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp1.462.537.630.165,00, Belanja Modal sebesar Rp554.543.944.655,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.851.850.000,00. Untuk Transfer dialokasikan sebesar Rp1.085.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.860.000.000,00.

2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017.

BABIII

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan Kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah secara rinci dapat dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2017.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2017.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 adalah Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu Pemerintah Kota Balikpapan memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPEserta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode.
- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

PENDAPATAN-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi siperbendahara dan diterbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

- i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

- a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Belanja Dibayar Dimuka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- b. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan meliputi:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

- f. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkot Balikpapan kepada BPD Kaltim.
 - 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.
 - 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.
- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan asset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)

Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban perhitungan pihak ketiga (PFK)

- a. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Pendapatan Diterima Di Muka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Balikpapan Per 31 Desember 2015, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.
- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah

- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - 2) Penjualan aset tetap
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal
 - 2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pinjaman
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 - 1) Penerimaan PFK.
 - 2) Penerimaan Panjar
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pengeluaran PFK.
 - 2) Pengeluaran panjar

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 1Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pendapatan	1.938.309.743.312,00	1.873.966.991.358,01	96,68	1.993.392.905.725,29
2.	Belanja	2.020.933.424.820,00	1.759.664.053.267,85	87,07	2.114.716.897.992,83
3.	Transfer	1.085.000.000,00	1.076.238.488,00	99,19	998.806.796,00
3.	Pembiayaan	83.708.681.508,00	85.007.745.930,00	101,55	224.891.480.572,09

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 untuk pendapatan :

5.1	PENDAPATAN	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		1.938.309.743.312,00	1.873.966.991.358,01	1.993.392.905.725,29

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2017. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 2Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2017

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	%	Kenaikan/Penurunan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	568.575.283.786,00	612.250.040.990,01	560.365.008.676,29	9,26	51.885.032.313,72
2.	Pendapatan Transfer:	1.367.134.459.526,00	1.259.322.950.368,00	1.427.957.897.049,00	(11,81)	(168.634.946.681,00)
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.600.000.000,00	2.394.000.000,00	5.070.000.000,00	(52,78)	(2.676.000.000,00)
	Jumlah	1.938.309.743.312,00	1.873.966.991.358,01	1.993.392.905.725,29	(5,99)	(119.425.914.367,28)

5.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		568.575.283.786,00	612.250.040.990,01	560.365.008.676,29

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perbandingan dengan Tahun 2016 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	450.213.740.232,52	403.690.047.708,65	46.523.692.523,87	11,52
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	47.563.009.260,52	46.624.692.440,79	938.316.819,73	2,01
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.163.120.190,93	15.051.835.627,69	111.284.563,24	0,74
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	99.310.171.306,04	94.998.432.899,16	4.311.738.406,88	4,54
	Jumlah	612.250.040.990,01	560.365.008.676,29	51.885.032.313,72	9,26

5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	419.000.000.000,00	450.213.740.232,52	403.690.047.708,65

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp450.213.740.232,52 terdiri dari pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. 4Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	TA 2017		Realisasi TA 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Pajak Hotel	40.000.000.000,00	41.789.257.635,00	39.393.467.912,95	2.395.789.722,05	6,08
2.	Pajak Restoran	63.000.000.000,00	65.995.675.877,00	59.523.017.719,28	6.472.658.157,72	10,87
3.	Pajak Hiburan	20.000.000.000,00	21.255.244.544,00	19.877.898.518,00	1.377.346.026,00	6,93
4.	Pajak Reklame	7.500.000.000,00	8.444.763.528,67	8.628.558.268,48	(183.794.739,81)	(2,13)
5.	Pajak Penerangan Jalan	100.000.000.000,00	103.528.130.820,00	94.427.087.967,74	9.101.042.852,26	9,64
6.	Pajak Parkir	17.000.000.000,00	17.524.710.030,00	14.592.708.349,00	2.932.001.681,00	20,09
7.	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.435.810.067,60	2.204.629.208,20	231.180.859,40	10,49
8.	Pajak Sarang Burung Walet	35.412.000,00	46.517.000,00	24.740.551,00	21.776.449,00	88,02
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.526.000.000,00	5.531.850.000,00	3.232.672.150,00	2.299.177.850,00	71,12
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	86.000.000.000,00	89.241.768.743,00	79.128.220.150,00	10.113.548.593,00	12,78
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	77.638.588.000,00	94.420.011.987,25	82.657.046.914,00	11.762.965.073,25	14,23
	Jumlah Pajak Daerah	419.000.000.000,00	450.213.740.232,52	403.690.047.708,65	46.523.692.523,87	11,52

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target Pajak Hotel Tahun 2017 sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.789.257.635,- atau 104,47%. Tercapainya target tersebut karena penambahan wajib pajak baru, meningkatnya omzet dari wajib pajak, adanya upaya intensifikasi serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2017 naik sebesar 6,08% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Hotel Tahun 2016 : Rp.39.393.467.912,95).
- Target Pajak Restoran Tahun 2017 sebesar Rp.63.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.65.995.675.877,- atau 104,76%. Tercapainya target tersebut karena penambahan wajib pajak baru, meningkatnya omzet dari wajib pajak dan adanya upaya intensifikasi serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017 naik sebesar 10,87% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016 : Rp.59.523.017.719,28).
- Target Pajak Hiburan Tahun 2017 sebesar Rp.20.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.255.244.544,- atau 106,28%. Tercapainya target tersebut karena penambahan wajib pajak baru, meningkatnya omzet dari wajib pajak, bertambahnya kegiatan hiburan insidental dan adanya upaya intensifikasi serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2017 naik sebesar 6,93% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2016 : Rp.19.877.898.518,-).
- Target Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.444.984.528,67 atau 112,60%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya reklame insidental (umbul-umbul/kain) dan adanya upaya intensifikasi terutama penyisiran reklame.. Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2017 turun sebesar -2,13% dari penerimaan tahun 2016 disebabkan beberapa reklame permanen/billboard yang tidak melakukan pemasangan reklame (Realisasi Pajak Reklame Tahun 2016 : Rp.7.628.558.268,48).

- e. Target Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 sebesar Rp.100.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.103.528.130.820,- atau 103,53%. Tercapainya target tersebut karena peningkatan tarif listrik oleh PLN dan intensifikasi untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 naik sebesar 9,64% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2016 : Rp.94.427.087.967,74).
- f. Target Pajak Parkir Tahun 2017 sebesar Rp.17.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.524.710.030,- atau 103,09%. Tercapainya target tersebut karena adanya peningkatan tarif masuk pengelola parkir sehingga meningkatkan penerimaan pajak parkir, adanya upaya intensifikasi serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2017 naik sebesar 20,09% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Parkir Tahun 2016 : Rp.14.592.708.349,-).
- g. Target Pajak Air Tanah Tahun 2017 sebesar Rp.2.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.435.810.067,60 atau 105,90%. Tercapainya target tersebut karena meningkatnya penambahan wajib pajak baru, adanya upaya intensifikasi terutama penyisiran bersama Dinas Lingkungan Hidup serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017 naik sebesar 10,49% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2016 : Rp.2.204.629.208,20).
- h. Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2017 sebesar Rp.265.827.794,-, menurun sebesar -41,85%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Air Tanah tahun 2016 sebesar Rp.457.124.992,40). Terdapat wajib pajak yang melakukan pembayaran atas piutang pajaknya.
- i. Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 sebesar Rp.35.412.000,- dengan realisasi sebesar Rp.46.517.000,- atau 131,36%. Tercapainya target tersebut karena adanya penambahan beberapa wajib pajak baru dan peningkatan produksi sarang burung walet sehingga meningkatkan penerimaan. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 naik sebesar 88,02% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2016 : Rp.24.740.551,-).
- j. Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017 sebesar Rp.5.526.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.531.850.000,- atau 100,11%. Tercapainya target tersebut karena adanya pengalihan lahan atas pembangunan kilang PT. Pertamina. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017 naik sebesar 71,12% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016 : Rp.3.232.672.150,-).
- k. Target PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp.86.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.241.768.743,- atau 103,77%. Tercapainya target tersebut karena upaya intensifikasi serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak dengan kegiatan pembukaan loket pembayaran keliling di kelurahan-kelurahan. Penerimaan PBB P2 Tahun 2017 naik sebesar 12,78% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi PBB P2 Tahun 2016 : Rp.79.128.220.150,-).
- l. Target BPHTB Tahun 2017 sebesar Rp.77.638.588.000,- dengan realisasi sebesar Rp.94.420.011.987,25 atau 121,61%. Tercapainya target tersebut karena adanya peningkatan wajib pajak yang melakukan pelaporan balik nama. Penerimaan BPHTB tahun 2017 naik sebesar 12,23% dari penerimaan tahun 2016 (Realisasi BPHTB Tahun 2016 : Rp.82.657.046.914,00).

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	46.420.013.978,00	47.563.009.260,52	46.624.692.440,79

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 adalah sebesar
Rp47.563.009.260,52denganrincian sebagai berikut:

Tabel 5. 5Rincian Realisasi PendapatanRetribusi Daerah TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	TA 2017		TA 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.458.673.428,00	3.741.121.727,31	4.184.686.504,79	(443.564.777,48)	(10,60)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.000.000.000,00	9.993.324.891,00	8.489.984.116,00	1.503.340.775,00	17,71
3	Retribusi Pelayanan Parkir	1.500.000.000,00	1.148.478.000,00	1.198.639.000,00	(50.161.000,00)	(4,18)

No.	Uraian	TA 2017		TA 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	di Tepi Jalan Umum					
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.970.546.152,00	4.772.017.913,00	3.417.337.618,00	1.354.680.295,00	39,64
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.005.740.000,00	1.821.010.000,00	1.984.155.000,00	(163.145.000,00)	(8,22)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	1.066.162.235,21	545.949.368,50	520.212.866,71	95,29
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	250.000.000,00	133.758.750,00	178.591.250,00	(44.832.500,00)	(25,10)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	124.839.300,00	139.171.575,00	37.048.250,00	102.123.325,00	275,65
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	417.000.000,00	406.531.200,00	187.937.080,00	218.594.120,00	116,31
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.768.770.098,00	4.152.604.069,00	3.434.093.703,00	718.510.366,00	20,92
11	Retribusi Tempat Pelelangan	200.000.000,00	24.450.000,00	-	24.450.000,00	-
12	Retribusi Terminal	33.000.000,00	28.996.000,00	62.292.000,00	(33.296.000,00)	(53,45)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	345.000.000,00	337.215.350,00	363.076.000,00	(25.860.650,00)	(7,12)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	86.400.000,00	102.185.500,00	69.768.000,00	32.417.500,00	46,46
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2.000.000.000,00	2.133.215.000,00	1.456.950.000,00	676.265.000,00	46,42
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000.000,00	11.230.805.350,00	13.973.184.605,50	(2.742.379.255,50)	(19,63)
17	Retribusi Izin Gangguan	5.900.000.000,00	5.878.032.900,00	6.694.974.345,00	(816.941.445,00)	(12,20)
18	Retribusi Izin Trayek	57.245.000,00	44.965.000,00	47.372.500,00	(2.407.500,00)	(5,08)
19	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	202.800.000,00	273.923.800,00	119.805.000,00	154.118.800,00	128,64
20	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	135.040.000,00	178.848.100,00	(43.808.100,00)	(24,49)
	Pendapatan Retribusi Daerah	46.420.013.978,00	47.563.009.260,52	46.624.692.440,79	938.316.819,73	2,01

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi retribusi TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Retribusi pelayanan kesehatan menurun karena bertambahnya puskesmas BLUD dan peralihan laboratorium menjadi BLUD.
- Retribusi pelayanan persampahan meningkat karena dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir telah menggunakan tarif baru yang lebih tinggi dari tarif sebelumnya serta ditemukan juga objek retribusi baru.
- Retribusi Pelayanan Pasar meningkat karena berlakunya tarif baru serta peningkatan monitoring untuk menghimbau wajib retribusi untuk membayar.
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan karena kendaraan yang melakukan uji berkurang drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan imbas dari banyaknya perusahaan batu bara yang tidak beroperasi lagi karena sebagian besar kendaraan yang diuji adalah kendaraan dari perusahaan batu bara.
- Retribusi terminal menurun karena dengan berlakunya PP No.18 Tahun 2016 dimana terminal tipe A beralih pengelolaannya ke pemerintah pusat.
- Retribusi pelayanan pelabuhan meningkat karena berlakunya tarif baru dan dilakukan pembenahan administrasi keuangan, peningkatan, pengawasan dan pembenahan SDM sesuai rekomendasi dari BPK tahun sebelumnya.

5.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		16.260.000.000,00	15.163.120.190,93	15.051.835.627,69

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2017 adalah sebesarRp15.163.120.190,93. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu :

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan
- c. Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp111.284.563,24 atau 0.74% dari TA 2016 yang berjumlah Rp15.051.835.627,69 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 6Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2017 dan 2016

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Naik (Turun)	%
		2017	2016		
1.	BUMD (PDAM)	6.855.935.578,00	8.555.172.250,70	(1.699.236.672,70)	(19,86)
2.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur	8.307.184.612,93	5.898.551.437,99	2.408.633.174,94	40,83
3.	Perusda Kota Balikpapan	0.00	598.111.939,00	(598.111.939,00)	(100,00)
	Jumlah	15.163.120.190,93	15.051.835.627,69	111.284.563,24	0,74

5.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		86.895.269.808,00	99.310.171.306,04	94.998.432.899,16

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2017 adalah sebesar Rp99.310.171.306,04.Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.311.738.406,88 atau 4,54% dari TA 2016 yang berjumlah Rp94.998.432.899,16.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 7Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahTA 2017 dan 2016

No	Uraian	TA 2017		TA 2016 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	00,00	44.055.200,00	00,00	44.055.200,00	-
2.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.500.000.000,00	2.442.442.091,53	2.904.711.106,91	(462.269.015,38)	(15,91)
3.	Pendapatan Bunga - LRA	00,00	1.608.561.624,60	5.871.576.358,14	(4.263.014.733,54)	(72,60)
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	00,00	32.652.849,00	7.366.729,00	25.286.120,00	343,25
5.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	00,00	3.675.351.702,00	3.077.483.914,86	597.867.787,14	19,43
6.	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	500.000.000,00	630.040.024,00	294.603.800,00	335.436.224,00	113,86
7.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	400.000.000,00	540.328.766,00	435.658.899,00	104.669.867,00	24,03
8.	Pendapatan BLUD - LRA	68.362.570.908,00	73.707.726.592,47	59.820.815.982,69	13.886.910.609,78	23,18
9.	Penggunaan Mobil Tinja - LRA	00,00	00,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(100,00)
10.	Tak Terduga - LRA	00,00	4.377.265.491,90	10.150.023.831,06	(5.772.758.339,16)	(56,87)
11.	Rekening Listrik Pasar - LRA	00,00	10.068.525,00	00,00	10.068.525,00	-
12.	Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel - LRA	1.792.500.000,00	1.024.726.237,00	1.011.285.814,00	13.440.423,00	1,33
13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	13.340.198.900,00	11.216.952.202,54	11.423.156.463,50	(206.204.260,96)	(1,82)

No	Uraian	TA 2017		TA 2016 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	86.895.269.808,00	99.310.171.306,04	94.998.432.899,16	4.311.738.406,88	4,54

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan secara signifikan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016 yang dapat dijelaskan sebagai berikut Peningkatan pendapatan dari BLUD meningkat karena Rumah Sakit Umum Daerah yang telah beroperasi penuh

5.1.2	Pendapatan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	Transfer	1.367.134.459.526,00	1.259.322.950.368,00	1.427.957.897.049,00

Pendapatan transfer pada tahun 2017direalisasikan sebesar Rp1.259.322.950.368,00 atau sebesar92,11 % dari target sebesar Rp1.367.134.459.526,00.Rincian realisasi dari Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 8Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2017

No.	Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	Realisasi2016	Naik/ (Turun)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat	922.960.601.526,00	817.394.319.468,00	1.066.561.649.134,00	(249.167.329.666,00)	(23,36)
2.	Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya	157.372.739.000,00	152.578.941.900,00	76.374.378.915,00	76.204.562.985,00	99,78
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	234.528.619.000,00	237.077.189.000,00	285.021.869.000,00	(47.944.680.000,00)	(16,82)
4	Bantuan Keuangan	52.272.500.000,00	52.272.500.000,00	0.00	52.272.500.000,00	-
	Jumlah	1.367.134.459.526,00	1.259.322.950.368,00	1.427.957.897.049,00	(168.634.946.681,00)	(11,81)

5.1.2.1	Transfer	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	Pemerintah Pusat	922.960.601.526,00	817.394.319.468,00	1.066.561.649.134,00
	– Dana			
	Perimbangan			

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak,Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.Realisasi Transfer PemerintahPusat tahun 2017adalahsebesar Rp817.394.319.468,00 mengalami penurunan sebesar Rp(249.167.329.666,00)atau (23,36)% dibandingkan dengan realisasi TA 2016. rincian realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 9Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Naik /Turun (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	143.138.978.011,00	142.907.891.921,00	231.086.090,00	0,16
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	220.016.427.595,00	457.744.385.992,00	(237.727.958.397,00)	(51,93)
3.	Dana Alokasi Umum	392.621.094.000,00	391.898.857.000,00	722.237.000,00	0,18
4.	Dana Alokasi Khusus	61.617.819.862,00	74.010.514.221,00	(12.392.694.359,00)	(16,74)
	Jumlah	817.394.319.468,00	1.066.561.649.134,00	(249.167.329.666,00)	(23,36)

5.1.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		183.156.977.000,00	143.138.978.011,00	142.907.891.921,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2017 adalah sebesar Rp143.138.978.011,00 mengalami peningkatan sebesar Rp231.086.090,00 atau 0,16 % dari TA 2016 yang berjumlah Rp142.907.891.921,00.Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 5. 10Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2017

No	Uraian	Realisasi		%	Naik/(turun)
		2017	2016		
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	13.228.902.385,00	24.421.546.987,00	(45,83)	(11.192.644.602,00)

No	Uraian	Realisasi		%	Naik/(turun)
		2017	2016		
3.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan Pph Pasal 21	129.910.075.626,00	118.486.344.934,00	9,64	11.423.730.692,00
	Jumlah	143.138.978.011,00	142.907.891.921,00	0,16	231.086.090,00

5.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	257.260.979.526,00	220.016.427.595,00	457.744.385.992,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2017 adalah sebesar Rp220.016.427.595,00 mengalami penurunan sebesar Rp(237.727.958.397,00) atau (51,93)% dari TA 2016 yang berjumlah Rp457.744.385.992,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 5. 11Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2017

No.	Uraian	Realisasi		%	Kenaikan / (Penurunan)
		2017	2016		
1.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.563.519.790,00	4.148.212.588,00	(38,20)	(1.584.692.798,00)
2.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	0.00	452.025.539,00	(100,00)	(452.025.539,00)
3.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	447.937.200,00	0,00	-	447.937.200,00
4.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	25.961.116.642,00	28.700.039.031,00	9.54	(2.738.922.389,00)
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	13.047.808.915,00	113.853.261.436,00	(88,54)	(100.805.452.521,00)
6.	Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	177.996.045.048,00	310.590.847.398,00	(42,69)	(132.594.802.350,00)
	Jumlah	220.016.427.595,00	457.744.385.992,00	(51,93)	(237.727.958.397,00)

5.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	392.620.000.000,00	392.621.094.000,00	391.898.857.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2017sebesar Rp392.620.000,00 atau naik 0,18% dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp391.898.857.000,00.

5.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	86.528.696.000,00	61.617.819.862,00	74.010.514.221,00

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp61.617.819.862,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.392.694.359,00 atau turun 16,74% dari TA 2016 yang berjumlah Rp74.010.514.221,00. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

Tabel 5. 12Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2017 dan TA 2016

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	14.252.932.000,00	27.702.509.764,00	(13.449.577.764,00)	(48,55)
2.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	2.833.809.150,00	-	2.833.809.150,00	-
3.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	2.232.672.000,00	79.266.000,00	2.153.406.000,00	2.716,68
4.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	1.182.173.000,00	64.854.000,00	1.117.319.000,00	1.722,82
5.	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	194.460.000,00	430.646.400,00	(236.186.400,00)	(54,84)
6.	DAK Bidang Kehutanan - LRA	-	153.411.000,00	(153.411.000,00)	(100,00)
7.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	497.175.000,00	-	497.175.000,00	-
8.	DAK Bidang Kesehatan - LRA	18.456.929.712,00	12.022.549.057,00	6.434.380.655,00	53,52
9.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	1.375.990.000,00	489.567.000,00	886.423.000,00	181,06

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Naik/(Turun)	%
10.	DAK Bidang Perdagangan - LRA	1.264.969.000,00	382.200.000,00	882.769.000,00	230,97
11.	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	-	133.137.000,00	(133.137.000,00)	(100,00)
12.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	7.260.000.000,00	-	7.260.000.000,00	-
13.	DAK Bidang Pertanian - LRA	-	622.644.000,00	(622.644.000,00)	(100,00)
14.	DAK Bidang Pendidikan - LRA	10.833.205.000,00	5.790.744.000,00	5.042.461.000,00	87,08
15.	DAK Bidang Perhubungan	-	112.890.000,00	(112.890.000,00)	(100,00)
16.	DAK Bidang Ifrastruktur Publik Daerah (IPD)	1.233.505.000,00	26.026.096.000,00	(24.792.591.000,00)	(95,26)
	Jumlah	61.617.819.862,00	74.010.514.221,00	(12.392.694.359,00)	(16,74)

5.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		157.372.739.000,00	152.578.941.900,00	76.374.378.915,00

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian yang direalisasikan sebesar Rp152.578.941.900,00 danmengalami kenaikan sebesar Rp76.204.562.985,00 atau 99,78 % dari TA 2016 yang berjumlah Rp76.374.378.915,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 13Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)TA 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/(Turun)	%
	2017	2016		
Tunjangan Profesi Guru PNSD	79.188.891.975,00	69.580.478.915,00	9.608.413.060,00	13,81
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	843.150.000,00	1.793.900.000,00	(950.750.000,00)	(53,00)
Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
Bantuan Operasional Sekolah	65.046.899.925,00	0.00	65.046.899.925,00	-
Jumlah	152.578.941.900,00	76.374.378.915,00	76.204.562.985,00	99,78

5.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		286.801.119.000,00	289.349.689.000,00	285.021.869.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltimyang direalisasikan sebesar Rp289.349.689.000,00dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.327.820.000,00 atau 1,52% dari TA 2016 yang berjumlah Rp285.021.869.000,00.

5.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		234.528.619.000,00	237.077.189.000,00	181.980.819.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2017 adalah sebesar Rp237.077.189.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.096.370.000,00 atau 30,28 % dari TA 2016 yang berjumlah Rp181.980.819.000,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

Tabel 5. 14Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Naik / (Turun)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	59.478.334.000,00	51.412.092.000,00	15,69	8.066.242.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Naik / (Turun)
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.375.879.000,00	36.437.160.000,00	21,7 9	7.938.719.000,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.308.159.000,00	71.556.031.000,00	55,5 5	39.752.128.000,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	531.864.000,00	365.659.000,00	45,4 5	166.205.000,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	21.382.953.000,00	22.209.877.000,00	(3, 72)	(826.924.000,00)
	Jumlah	237.077.189.000,00	181.980.819.000,00	30,28	55.096.370.000,00

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	52.272.500.000,00	52.272.500.000,00	103.041.050.000,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2017 adalah sebesar Rp52.272.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(50.768.550.000,00) atau (49,27)% dari TA 2016 yang berjumlah Rp103.041.050.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 15Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi KaltimTA 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi (Rp)		%	Naik / (Turun)
	2017	2016		
Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim	52.272.500.000,00	103.041.050.000,00	(49,27)	(50.768.550.000,00)
Jumlah	52.272.500.000,00	103.041.050.000,00	(49,27)	(50.768.550.000,00)

5.1.3 Lain - Lain Pendapatan Yang sah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	2.600.000.000,00	2.394.000.000,00	5.070.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.394.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.676.000.000,00 atauturun 52,78% dari TA 2016 yang berjumlah Rp5.070.000.000,00.

Hibah yang diperoleh tersebut merupakan program bantuan dari Pemerintah Pusat dengan AUSAID untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM.

5.2 Belanja Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	2.020.933.424.820,00	1.759.664.053.267,85	2.114.716.897.992,83

Belanja Daerahterdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dimana dalam Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2.020.933.424.820,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.759.664.053.267,85. Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp355.052.844.724,98 atau turun sebesar 16,79% dari Tahun 2016 yang berjumlah sebesar Rp2.114.716.897.992,83 seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 16Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2017

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1.	Belanja Operasi	1.462.537.630.165,00	1.307.594.647.176,43	1.549.526.450.521,29	(241.931.803.344,86)	(15,61)
2.	Belanja Modal	554.543.944.655,00	451.891.556.091,42	564.259.837.371,54	(112.368.281.280,12)	(19,91)
3.	Belanja Tak Terduga	3.851.850.000,00	177.850.000,00	930.610.100,00	(752.760.100,00)	(80,89)
	Jumlah	2.020.933.424.820,00	1.759.664.053.267,85	2.114.716.897.992,83	(355.052.844.724,98)	(16,79)

Rincian Belanja per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 1* sedangkan rincian belanja per rekening secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 2*

5.2.1	Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		1.462.537.630.165,00	1.307.594.647.176,43	1.549.526.450.521,29

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja subsidi yang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 17Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	%	Naik/(Turun)
	Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	619.769.032.888,00	574.721.273.231,75	709.143.921.418,53	(18,96)	(134.422.648.186,78)
2	Belanja Barang dan jasa	763.772.757.277,00	664.507.242.810,68	696.574.344.801,76	(4,60)	(32.067.101.991,08)
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00	25,00	200.000.000,00
4	Belanja Hibah	76.495.840.000,00	67.248.807.434,00	142.574.661.901,00	(52,83)	(75.325.854.467,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	117.323.700,00	433.522.400,00	(72,94)	(316.198.700,00)
	Jumlah	1.462.537.630.165,00	1.307.594.647.176,43	1.549.526.450.521,29	(15,61)	(241.931.803.344,86)

Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		619.769.032.888,00	574.721.273.231,75	709.143.921.418,53

Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai yang merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp134.422.648.186,78 atau 18,96% dari TA 2016. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 18Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	327.502.050.921,00	309.168.569.928,00	366.288.309.860,20	(57.119.739.932,20)	(15,59)
2.	Tambahan Penghasilan PNS	257.044.406.967,00	236.095.016.914,00	317.783.603.036,00	(81.688.586.122,00)	(25,71)
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.390.003.000,00	7.646.130.000,00	4.628.120.000,00	3.018.010.000,00	65,21
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	24.413.459.000,00	21.513.630.704,75	16.647.962.766,83	4.865.667.937,92	29,23
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.419.113.000,00	297.925.685,00	1.345.503.755,50	(1.047.578.070,50)	(77,86)
6	Uang Lembur	0.00	0.00	2.450.422.000,00	(2.450.422.000,00)	(100,00)
	Jumlah	619.769.032.888,00	574.721.273.231,75	709.143.921.418,53	(134.422.648.186,78)	(18,96)

5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
		763.772.757.277,00	664.507.242.810,68	696.574.344.801,76

Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp664.507.242.810,68 merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp(32.067.101.991,08) atau (4,60)% Rincian Realisasi belanja barang dan jasa telah tersaji pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini

5.2.1.3 Belanja Subsidi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00

Belanja Subsidi direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp1.000.000.000,00. Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan Kota Balikpapan melalui Perusahaan Daerah Kota Balikpapan. Belanja Subsidi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 25% atau sebesar Rp200.000.000,00 dari sebelumnya Rp800.000.000,00. Belanja subsidi diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan Bis Sekolah, yang dikelola oleh Perusda Kota Balikpapan. Bis Sekolah diperoleh hibah dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Balikpapan meraih anugerah Wahana Tata Nugraha. Dana subsidi dipergunakan Perusda Kota Balikpapan untuk membiayai operasional bis sehingga biaya transport untuk anak-anak sekolah menjadi terjangkau.

Menurut data dari Perusda Kota Balikpapan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Biaya yang diperlukan untuk operasional bus sekolah adalah Rp1.077.850.170,94
- b. Biaya rata-rata per siswa adalah Rp10.111,30 yang didapat dari pembagian seluruh biaya sebesar Rp1.077.850.170,94 dengan asumsi jumlah karcis terjual dari 106.598 siswa

5.2.1.4 Belanja Hibah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	76.495.840.000,00	67.248.807.434,00	142.574.661.901,00

Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp67.248.807.434,00 atau menurun sebesar Rp(75.325.854.467,00) atau (52,83)% dari realisasi TA 2016 yang berjumlah sebesar Rp142.574.661.901,00. Belanja hibah diperuntukkan bagi peningkatan dan partisipasi masyarakat/lembaga/organisasi dalam pembangunan dan pendidikan Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Hibah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 19 Realisasi Belanja Hibah TA 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.772.000.000,00	8.113.650.000,00	18.015.775.000,00	(54,96)	(9.902.125.000,00)
2.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	29.109.470.000,00	26.956.516.035,00	88.474.003.758,00	(69,53)	(61.517.487.723,00)
3.	Belanja Hibah Dana BOS	35.614.370.000,00	32.178.641.399,00	36.084.883.143,00	(13,35)	(3.906.241.744,00)
	Jumlah	76.495.840.000,00	67.248.807.434,00	142.574.661.901,00	(52,83)	(75.325.854.467,00)

5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	1.500.000.000,00	117.323.700,00	433.522.400,00

Belanja Bantuan Sosial direalisasikan sebesar Rp117.323.700,00 atau menurun sebesar Rp(316.198.700,00) atau (72,94)% dari realisasi TA 2016 yang berjumlah sebesar Rp433.522.400,00. Belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

5.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	554.543.944.655,00	451.891.556.091,42	564.259.837.371,54

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp451.891.556.091,42 merupakan pengeluaran yang menambah aset tetap Pemerintah Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2017

mengalami penurunan sebesar Rp(112.368.281.280,12)atau (19,91)% dibandingkan dengan TA 2016dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016

No .	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Belanja Tanah	76.876.228.000,00	50.892.259.853,00	83.846.532.317,00	(32.954.272.464,00)	(39,30)
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	41.718.033.170,00	32.892.942.039,08	52.524.546.155,26	(19.631.604.116,18)	(37,38)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	241.542.799.716,00	212.144.062.887,90	285.244.005.338,18	(73.099.942.450,28)	(25,63)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.278.864.852,00	133.721.977.463,00	118.372.105.607,84	15.349.871.855,16	12,97
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	42.645.018.917,00	21.765.965.488,44	11.340.765.688,26	10.425.199.800,18	34,89
6.	Belanja Aset Lainnya	483.000.000,00	474.348.360,00	12.931.882.265,00	(12.457.533.905,00)	(96,33)
	Jumlah	554.543.944.655,00	451.891.556.091,42	564.259.837.371,54	(112.368.281.280,12)	(19,91)

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	76.876.228.000,00	50.892.259.853,00	83.846.532.317,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp50.892.259.853,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.954.272.464,00 atau turun sebesar 39,30% dari realisasi TA 2016sebesar Rp83.846.532.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2016

No .	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	%
2	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	36.000.000,00	35.263.500,00	-	35.263.500,00	-
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	5.000.000.000,00	4.985.145.001,00	-	4.985.145.001,00	-
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.452.271.000,00	-	36.307.995.000,00	(36.307.995.000,00)	(100,00)
5	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	67.387.957.000,00	45.871.851.352,00	47.538.537.317,00	(1.666.685.965,00)	(3.51)
Total		76.876.228.000,00	50.892.259.853,00	83.846.532.317,00	(32.954.272.464,00)	(39,30)

5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	41.718.033.170,00	32.892.942.039,08	52.524.546.155,26

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.892.942.039,08 mengalami penurunan sebesar Rp(19.631.604.116,18) atau (37,38)% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp52.524.546.155,26. Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada *lampiran 2*.

5.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	241.542.799.716,00	212.144.062.887,90	285.244.005.338,18

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp212.144.062.887,90 mengalami penurunan sebesar Rp(73.099.942.450,28)atau (25,63)% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp285.244.005.338,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 dan 2016

N o	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	231.618.296.476,00	204.010.683.357,90	271.972.262.325,18	(67.961.578.967,28)	(24,99)
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	191.000.000,00	189.863.000,00	98.619.000,00	91.244.000,00	92,52
3	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	-	-	94.056.207,00	(94.056.207,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	450.000.000,00	-	-	-	-
5	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	955.550.240,00	910.789.210,00	992.230.260,00	(81.441.050,00)	(8,21)
6	Belanja Modal Pengadaan Taman serta Sarana dan Prasarananya	200.000.000,00	195.951.000,00	168.015.000,00	27.936.000,00	16,63
7	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman	1.020.000.000,00	996.856.500,00	441.249.500,00	555.607.000,00	125,92
8	Belanja Modal Pengadaan Pendukung Bangunan	4.852.703.000,00	4.069.556.540,00	9.883.039.606,00	(5.813.483.066,00)	(58,82)
9	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pariwisata	1.000.000.000,00	722.707.280,00	1.336.688.000,00	(613.980.720,00)	(45,93)
10	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pengolahan Sampah	1.255.250.000,00	1.047.656.000,00	257.845.440,00	789.810.560,00	306,31
Total		241.542.799.716,00	212.144.062.887,90	285.244.005.338,18	(73.099.942.450,28)	(25,63)

5.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2017 (Rp)151.278.864.852,00

Realisasi 2017 (Rp)133.721.977.463,00

Realisasi 2016 (Rp)118.372.105.607,84

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.721.977.463,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.349.871.855,16 atau 12,97 % dari realisasi TA 2016 sebesar Rp118.372.105.607,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 dan 2016

N o	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja modal Pengadaan Jalan	99.668.917.800,00	89.388.243.750,00	81.397.052.647,82	7.991.191.102,18	9,82
2	Belanja modal Pengadaan Jembatan	2.936.273.000,00	2.936.273.000,00	3.014.262.714,02	(77.989.714,02)	(2,59)
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	509.150.000,00	504.928.750,00	1.028.187.844,00	(523.259.094,00)	(50,89)
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.736.616.902,00	1.257.543.507,00	401.509.598,00	856.033.909,00	213,20
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	40.190.693.150,00	34.697.026.100,00	28.355.711.809,00	6.341.314.291,00	22,36
6	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	4.070.075.000,00	3.230.996.807,00	35.012.000,00	3.195.984.807,00	9.128,26
7	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	00,00	00,00	1.043.058.000,00	(1.043.058.000,00)	(100,00)

N o	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	00,00	00,00	296.566.000,00	(296.566.000,00)	(100,00)
9	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	609.500.000,00	528.915.123,00	675.717.700,00	(146.802.577,00)	(21,73)
10	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.555.639.000,00	1.178.050.426,00	2.117.602.295,00	(939.551.869,00)	(44,37)
11	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	2.000.000,00	00,00	7.425.000,00	(7.425.000,00)	(100,00)
Total		151.278.864.852,00	133.721.977.463,00	118.372.105.607,84	15.349.871.855,16	12,97

5.2.2.5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi 2017 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

42.645.018.917,00

21.765.965.488,44

11.340.765.688,26

Realisasi Belanja Aset tetap lainnya sebesar Rp21.765.965.488,44Rp10.425.199.800,18 atau 91,93% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp11.340.765.688,26. Kenaikan Anggaran dan Realisasi TA 2017 untuk Belanja Modal Aset Tetap lainnya dikarenakan ada Belanja Modal Dana BOS PUSAT yang dianggarkan sebesar Rp6.147.166.445,00 dan terealisasi sebesar Rp6.468.592.053,00 atau 105,23%.Untuk Belanja Aset Tetap Lainnya tanpa Dana BOS Pusat dianggarkan sebesar Rp36.497.852.472,00 terealisasi sebesar Rp15.297.373.435,44 atau 34,89% dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 24

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Kenaikan/(Penurunan)	Realisasi 2016
1	Belanja modal Pengadaan Buku	390.195.000,00	220.644.270,00	(81,55)	1.195.652.410,00	(975.008.140,00)
2	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	26.500.000,00	25.300.000,00	-	-	25.300.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.400.000,00	3.400.000,00	(98,47)	221.701.900,00	(218.301.900,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Pembuangan Sampah/Akhir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
5	Belanja Modal BLUD RSKBSI	5.643.700.000,00	419.039.294,00	27,07	329.781.847,00	89.257.447,00
6	Belanja Modal BLUD Puskesmas.	684.000.000,00	457.356.164,00	(20,54)	575.600.958,30	(118.244.794,30)
7	Belanja Modal BLUD RSUD	14.966.461.322,00	1.035.540.487,00	(79,75)	5.112.689.572,96	(4.077.149.085,96)
8	Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud	13.295.421.700,00	12.105.878.990,00	209,98	3.905.339.000,00	8.200.539.990,00
9	Belanja Modal Kapitasi JKN	1.478.174.450,00	1.020.214.230,44	69,02	1.020.214.230,44	-

5.2.2.6

Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2017 (Rp)

Realisasi 2017 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

483.000.000,00

474.348.360,00

1.091.310.000,00

Realisasi Belanja Aset lainnya sebesar Rp474.348.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp(12.457.533.905,00)atau (96,33)% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp1.091.310.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2017 dan TA 2016

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Aset Lainnya	483.000.000,00	474.348.360,00	12.931.882.265,00	(12.457.533.905,00)	(96,33)
1	Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	11.840.572.265,00	(11.840.572.265,00)	(100.00)
2	Aset lain-lain	483.000.000,00	474.348.360,00	1.091.310.000,00	(616.961.640,00)	(56,53)

5.2.3	Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2017 3.851.850.000,00	Realisasi 2017 (Rp) 177.850.000,00	Realisasi 2016 (Rp) 930.610.100,00
--------------	------------------------------	--	--	--

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp3.851.850.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp177.850.000,00. Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016menunjukkan penurunan sebesar Rp(752.760.100,00) atau (80,89)%.

Belanja tidak terduga TA 2016 direalisasikan untuk rehabilitasi dan bantuan atas bencana yang terjadi di Kota Balikpapan selama tahun 2017yaitu bencana kebakaran di di Jl Sumber Sari RT.22 Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan selain itu juga termasuk pengembalian BPHTB.

5.2.4	TRANSFER	Anggaran 2017 1.085.000.000,00	Realisasi 2017 1.076.238.488,00	Realisasi 2016 998.806.796,00
--------------	-----------------	--	---	---

5.2.4.1	Transfer/Bantuan Keuangan	Anggaran 2017 (Rp) 1.085.000.000,00	Realisasi 2017 (Rp) 1.076.238.488,00	Realisasi 2016 (Rp) 998.806.796,00
----------------	----------------------------------	---	--	--

Transfer/Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan pada partai politik dengan alokasi sebesar Rp1.076.238.488,00 danrealisasi sebesar Rp998.806.796,00.

5.3.	PEMBIAYAAN	Anggaran 2017 (Rp) 83.708.681.508,00	Realisasi 2017 (Rp) 85.007.745.930,00	Realisasi 2016 (Rp) 224.891.480.572,09
-------------	-------------------	--	---	--

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.3.1	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2017 (Rp) 102.568.681.508,00	Realisasi 2017 (Rp) 102.568.681.508,00	Realisasi 2016 (Rp) 227.891.480.572,09
--------------	------------------------------	---	--	--

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp102.568.681.508,00 merupakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Penggunaan SiLPATahun sebelumnya sebesar Rp227.891.480.572,09.

5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2017 (Rp) 18.860.000.000,00	Realisasi 2017 (Rp) 17.560.935.578,00	Realisasi 2016 (Rp) 3.000.000.000,00
--------------	-------------------------------	--	---	--

Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 26Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	8.305.000.000,00	0.00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Balikpapan	9.255.935.578,00	3.000.000.000,00

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)
3.	Penyertaan Modal pada Perusda Kota Balikpapan	0.00	0.00
	Jumlah	17.560.935.578,00	3.000.000.000.00

5.3.3	SISA LEBIH	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	PEMBIAYAAN	0,00	198.305.531.831,24	102.568.681.508,55
	ANGGARAN			

SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp 198.305.531.831,24 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

5.4	LAPORAN PERUBAHAN SAL	Anggaran 2017 (Rp)	Anggaran 2016 (Rp)
		198.234.445.532,16	102.568.681.508,55

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2017 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menunjukkan Saldo Anggaran Akhir sebesar Rp198.234.445.532,16.

Tabel 5. 27Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	102.568.681.508.00	227.891.480.572,09
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(102.568.681.508,00)	(227.891.480.572,09)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	198.234.445.532,16	102.568.681.508,55
Subtotal	198.234.445.532,16	102.568.681.508,55
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	198.234.445.532,16	102.568.681.508,55

5.4.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
		102.568.681.508,55	227.891.480.572,09

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp102.568.681.508,55 merupakan nilai yang didapat dari saldo anggaran lebih akhir tahun anggaran 2016.

5.4.2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Tahun Anggaran 2016 (Rp)
		(102.568.681.508,00)	(227.891.480.572,09)

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(102.568.681.508,00)

5.4.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Tahun Anggaran 2016 (Rp)
		198.234.445.532,16	102.568.681.508,55

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp198.234.445.532,16

C. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2017. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

5.5 ASET

Per 31 Desember 2017
Rp 7.863.461.301.524,35

Per 31 Desember 2016
Rp7.808.312.345.547,12

Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2017 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset TA 2017 bila dibandingkan dengan TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 28Rincian Aset TA 2017 dan 2016				
No .	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Aset Lancar	376.097.340.897,11	347.433.752.654,36	28.663.588.242,75
2.	Investasi Jangka Panjang	513.967.872.239,90	495.981.642.338,58	17.986.229.901,32
3 .	Aset Tetap	6.642.144.430.333,21	6.606.725.354.590,36	35.419.075.742,85
4.	Aset Lainnya	331.251.658.054,13	358.171.595.963,81	(26.919.937.909,68)
	Jumlah	7.863.461.301.524,35	7.808.312.345.547,11	55.148.955.977,24

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

5.5.1 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2017
Rp376.097.340.897,11

Per 31 Desember 2016
Rp 347.433.752.654,36

Aset Lancar merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar TA 2017 bila dibandingkan dengan TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 29Rincian Aset Lancar TA 2017 dan 2016				
No .	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	52.086.042.210,57	67.388.111.428,50	(15.304.046.056,93)

No	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	89.615.400,00	15.052.219,00	74.563.181,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	117.347.911,00	-
4.	Kas di BLUD	41.938.929.944,68	30.983.213.924,53	10.955.716.020,15
5.	Kas Lainnya	5.128.870.209,46	6.085.288.939,96	(956.418.730,50)
6.	Investasi Jangka Pendek (Setara Kas)	100.000.000.000,00	0.00	-
7.	Piutang Pajak	116.479.942.252,82	100.447.198.648,36	16.032.743.604,46
8.	Piutang Retribusi	2.251.551.971,81	2.129.308.897,30	122.243.074,51
9.	Piutang Jasa Layanan (BLUD)	11.468.508.212,36	11.287.221.160,60	181.287.051,76
10.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	953.607.065,70	764.854.907,01	188.752.158,69
11.	Piutang Lainnya	99.083.897,76	23.207.967.554,36	(23.108.883.656,60)
12.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	23.958.931.360,00	85.125.193.102,23	(61.166.261.742,23)
13.	Belanja Dibayar Dimuka	1.542.750.482,19	1.750.323.682,19	(207.573.200,00)
14.	Persediaan	20.099.507.889,78	18.132.670.208,83	1.966.837.680,95
	Jumlah	376.097.340.897,11	347.433.752.654,36	31.026.801.821,42

5.5.1.1
Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2017

Rp 52.086.042.210,57

Per 31 Desember 2016

Rp 67.388.111.428,50

Saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp 52.086.042.210,57 merupakan Saldo kas Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di rekening giro pada Bank Kaltimper 31 Desember 2017 yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 30Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Balikpapan	0031300508	52.086.042.210,57	67.388.111.428,50	(15.302.069.217,93)
Jumlah			52.086.042.210,57	67.388.111.428,50	(15.302.069.217,93)

5.5.1.2
Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2017

Rp89.615.400,00

Per 31 Desember 2016

Rp15.052.219,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017merupakan saldo kas atas pendapatan retribusi yang ada di Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Disporabudpar per 31 Desember 2017. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2017 dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 31Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	997.000.00	0.00	997.000.00
2.	Disporabudpar	83.670.000.00	0.00	83.670.000.00
3.	Dinas Kesehatan	4.948.400,00	0.00	4.948.400,00
	Jumlah	89.615.400,00	0,00	89.615.400,00

5.5.1.3
Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2017
Rp0.00

Per 31 Desember 2016
Rp117.347.911,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran OPD Per 31 Desember 2017 atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) per 31 Desember 2017 yang disetorkan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 32Sisa UP/GU/TU yang belum disetor per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Bertambah/
		(Rp)	(Rp)	Berkurang (Rp)
1	BPMP2KB	0.00	35.553.736,00	(35.553.736,00)
2	Dinas Pasar	0.00	76.432.175,00	(76.432.175,00)
3	Disporabudpar	0.00	5.362.000,00	(5.362.000,00)
Jumlah		0.00	117.347.911,00	(117.347.911,00)

5.5.1.4
Kas di BLUD

Per 31 Desember 2017
Rp 41.938.929.944,68

Per 31 Desember 2016
Rp30.983.213.924,53

Merupakan Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang terdapat di tiga SKPD BLUD Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2017 sebesar Rp 41.938.929.944,68 terdiri dari:

Tabel 5. 33Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	BLUD RSKB Sayang Ibu	9.354.798.322,73	7.644.269.329,16	1.710.528.993,57
2.	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	28.832.388.096,45	20.309.230.460,29	8.523.157.636,16
3.	BLUD Puskesmas Sepinggan	737.771.109,03	507.965.940,12	229.805.168,91
4.	BLUD Puskesmas Prapatan	164.406.931,34	177.729.441,79	(13.322.510,45)
5.	BLUD Puskesmas Kariangau	200.713.235,76	131.675.191,37	69.038.044,39
6.	BLUD Puskesmas Karang Joang	718.070.041,84	576.862.123,48	141.207.918,36
7.	BLUD Puskesmas Baru Tengah	661.386.028,29	639.662.319,14	21.723.709,15
8.	BLUD Puskesmas Klandasan Ilir	989.389.003,96	801.387.853,95	188.001.150,01
9	BLUD Puskesmas Mekar Sari	280.007.175,28	194.431.265,23	85.575.910,05
Jumlah		41.938.929.944,68	30.983.213.924,53	10.955.716.020,15

Selain tabel perbandingan di atas, dapat dirincikan posisi keuangan BLUD per 31 Desember 2017 sesuai rekening bank dan tunai pada tabel berikut :

Tabel 5. 34Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2017

No	Unit Kerja	Bank	No Rekening	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai
1	Rumah Sakit Sayang Ibu	Bank Kaltimara	0031550734	1.419.563.398,84	637.100,00
		BNI	8989422088	2.005.810.737,00	
		BTN	0000004501300006233	5.928.787.086,89	
				9.354.161.222,73	637.100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Mandiri	1490011231125	371.746.131,97	40.352.143,67
		BRI	012101002212306	28.420.289.820,81	
				28.792.035.952,78	40.352.143,67

No	Unit Kerja	Bank	No Rekening	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai
3	Puskemas Klandasan Ilir	Bank Kaltimtara		984.566.003,96	4.823.000,00
4	Puskemas Baru Tengah	Bank Kaltimtara	1351500600	661.386.028,29	-
5	Puskemas Mekar Sari	Bank Kaltimtara	0031556104	278.978.175,28	1.029.000,00
6	Puskemas Karang Joang	Bank Kaltimtara	0031556155	715.813.041,84	2.257.000,00
7	Puskemas Sepinggan	Bank Kaltimtara	1351500596	736.053.109,03	1.718.000,00
8	Puskemas Kariangau	Bank Kaltimtara	0031556139	197.587.535,76	3.125.700,00
9	Puskemas Prapatan	Bank Kaltimtara	1351500618	164.406.931,34	-
J U M L A H				41.884.988.001,01	53.941.943,67

5.5.1.5
Kas Lainnya

Per 31 Desember 2017

Rp5.128.870.209,46

Per 31 Desember 2016

Rp6.085.288.939,96

Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Dinas Kesehatan Kota, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Dinas Pendidikan yang bila dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 35Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	SKPD	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota (JKN)	3.769.013.803,46	4.132.754.295,96	(363.740.493)
2.	Dinas Pendidikan (BOS Pusat)	1.359.856.406,00	1.951.940.166,00	(592.083.760)
	Jumlah	5.128.870.209,46	6.085.288.939,96	(956.418.731)

Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 3& Lampiran 4*.

5.5.1.6
Investasi Jangka Pendek
(Setara Kas)

Per 31 Desember 2017

Rp100.000.000.000

Per 31 Desember 2016

Rp0.00

Setara kas pada aset lancar merupakan deposito Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat pada Bank BRI Cabang Balikpapan per 31 Desember 2017 yang diketahui sebesar Rp50.000.000.000,- dan BTN sebesar Rp50.000.000.000,- Perbandingan deposito di Tahun 2017 dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 36Saldo Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Bank	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	BRI Cabang Balikpapan	50.000.000.000,00	0.00	50.000.000.000,00
	No. DC 0060322	30.000.000.000,00		
	No. DC 0060318	20.000.000.000,00		
2	BTN	50.000.000.000,00	0.00	50.000.000.000,00
	No. DC 1556542	10.000.000.000,00		
	No. DC 1556543	10.000.000.000,00		
	No. DC 1556544	10.000.000.000,00		
	No. DC 1556545	10.000.000.000,00		
	No. DC 1556546	10.000.000.000,00		
	Jumlah	100.000.000.000,00	0.00	100.000.000.000,00

5.5.1.7
Piutang Pajak

Per 31 Desember 2017

Rp249.594.530.033,75

Per 31 Desember 2016

Rp216.364.643.997,15

Piutang pajak per 31 Desember 2017sebesar Rp249.594.530.033,75adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2017.

Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 37Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2017	Saldo Per 31 Des 2016 (Audited)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Pajak Hotel	17.165.040.897,00	12.394.219.797,00	4.770.821.100,00
2	Pajak Restoran	3.266.736.702,00	3.243.953.171,00	22.783.531,00
3	Pajak Hiburan	2.036.490.767,00	614.682.518,00	1.421.808.249,00
4	Pajak Reklame	4.746.392.334,75	4.478.724.644,75	267.667.690,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.898.463.034,00	8.172.201.863,00	726.261.171,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	91.012.000,00	91.012.000,00	0,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	265.827.794,00	457.124.992,40	(191.297.198)
8	Pajak Parkir	699.226.736,00	675.389.636,00	23.837.100,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00
Jumlah		37.173.708.264,75	30.131.826.622,15	7.041.881.642,60
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	212.409.816.814,00	186.223.945.625,00	26.185.871.189,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.004.955,00	8.871.750,00	2.133.205,00
Total		249.594.530.033,75	216.364.643.997,15	33.229.886.036,60

Penjelasan atas kenaikan/(penurunan) piutang pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Hotel Tahun 2017 sebesar Rp.17.165.040.897,-, meningkat 38,49%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Hotel Tahun 2016 sebesar Rp.12.394.219.797,-). Peningkatan piutang dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
2. Piutang Pajak Restoran Tahun 2017 sebesar Rp.3.294.145.240,-, meningkat 1,55% dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak RestoranTahun 2016 sebesar Rp.3.243.953.171,-). Peningkatan ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
3. Piutang Pajak Hiburan Tahun 2017 sebesar Rp.1.889.778.017,-, meningkat 207,44%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Hiburan Tahun 2016 sebesar Rp.614.682.518,-). Peningkatan ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
4. Piutang Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar Rp.4.745.800.460,08,-, meningkat 5,96%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Reklame Tahun 2016 sebesar Rp.4.478.724.644,75). Peningkatan ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 sebesar Rp.9.126.194.505,-, meningkat 11,67%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2016 sebesar Rp.8.172.201.863,-). Peningkatan ini dikarenakan terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
6. Piutang Pajak Parkir Tahun 2017 sebesar Rp.699.226.736,- meningkat 3,53%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Parkir tahun 2016 sebesar Rp.675.389.636,-). Penambahan piutang oleh satu wajib pajak dan telah melakukan pembayaran atas piutang pajaknya di tahun 2018.
7. Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2017 sebesar Rp.282.399.488,-, menurun sebesar -38,22%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Pajak Air Tanah tahun 2016 sebesar Rp.457.124.992,40). Terdapat wajib pajak yang melakukan pembayaran atas piutang pajaknya.
8. Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 sebesar Rp.4.518.000,-, tidak mengalami peningkatan dan pengurangan dari piutang tahun 2016. Piutang berasal dari wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi (wajib pajak pasif).

9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017 sebesar Rp.91.012.000,-, tidak mengalami peningkatan dan pengurangan dari piutang tahun 2016. Piutang berasal dari wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi (wajib pajak pasif).
10. Piutang PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp.212.056.953.827,- meningkat 13,87%, dari piutang tahun 2016 (Piutang PBB P2 tahun 2016 sebesar Rp.186.223.945.625,-). Peningkatan ini dikarenakan wajib pajak tidak melakukan pembayaran PBB P2 dan belum dilakukan cleansing data.
11. Piutang BPHTB Tahun 2017 sebesar Rp.11.004.955,-, meningkat 24,04%, dari piutang tahun 2016 (Piutang Piutang BPHTB Tahun 2016 sebesar Rp.8.871.750,-). Peningkatan ini dikarenakan kurang bayar yang disebabkan perbedaan perhitungan wajib pajak dengan hasil validasi BPPDRD.

Daftar Mutasi Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5**

5.5.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	Rp(133.114.587.780,93)	Rp(115.917.445.348,79)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp(133.114.587.780,93) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan piutang pajak di tahun 2017 dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 38Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Pajak	(133.114.587.780,93)	(115.917.445.348,79)	(249.032.033.130)
	Jumlah	(133.114.587.780,93)	(115.917.445.348,79)	(249.032.033.130)

Rincian Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.5.1.8 Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	Rp 11.178.295.850,90	Rp 9.083.443.259,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2017 merupakan piutang atas pungutan retribusi di OPD atas retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan, izin gangguan, IMB, pengendalian menara telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi, kesehatan.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2017dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 39Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2017dan 2016

No	Uraian	Saldo Awal (2016)	MUTASI		Saldo Akhir (2017)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Retribusi Pasar	6.928.887.754,00	5.373.848.540,00	4.271.262.139,00	8.031.474.155,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	482.515.500,00	2.862.313.750,00	2.636.550.250,00	708.279.000,00
3	Retribusi Kebersihan PDAM	596.786.306,00	7.522.139.360,00	7.350.262.641,00	768.663.025,00
4	Retribusi Izin Gangguan	382.795.500,00	-	306.000,00	382.489.500,00
5	Retribusi IMB	344.671.199,00	-	6.291.284,00	338.379.915,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	288.956.000,00	-	288.956.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	37.025.000,00	78.262.500,00	37.025.000,00	78.262.500,00

No	Uraian	Saldo Awal (2016)	MUTASI		Saldo Akhir (2017)
			Penambahan	Pengurangan	
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempe)	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aset BPKD)	309.262.000,00	763.894.143,10	647.744.387,20	425.411.755,90
10	Retribusi Tempat Rekreasi	-	184.100.000,00	40.500.000,00	143.600.000,00
11	Retribusi Kesehatan	-	11.280.000,00	-	11.280.000,00
JUMLAH		9.083.443.259,00	17.084.794.293,10	14.989.941.701,20	11.178.295.850,90

5.5.1.8.1
Penyisihan Piutang Retribusi

Per 31 Desember 2017
Rp(8.926.743.879,10)

Per 31 Desember 2016
Rp(6.645.454.421,70)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp(8.926.743.879,10) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.5.1.9
Piutang Jasa Layanan (BLUD)

Per 31 Desember 2017
Rp 13.961.311.041,46

Per 31 Desember 2016
Rp11.738.493.150,12

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.961.311.041,46merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSKBSayang Ibu Balikpapan, 7 (tujuh) BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 40Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2017	Saldo Per 31 Des 2016	Bertambah/(berkurang)
1	RUMAH SAKIT SAYANG IBU	2.102.938.100,00	1.394.842.800,00	708.095.300,00
2	DINAS KESEHATAN KOTA	119.381.808,00	58.192.508,00	61.189.300,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11.738.991.133,46	10.285.457.842,12	1.453.533.291,34
Jumlah		13.961.311.041,46	11.738.493.150,12	2.222.817.891,34

Daftar Mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 8*

5.5.1.9.1
Penyisihan Piutang Jasa Layanan

Per 31 Desember 2017
Rp (2.492.802.829,10)

Per 31 Desember 2016
Rp(451.271.989,80)

Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2017 sebesar Rp (2.492.802.829,10) merupakan taksiran nilai piutang jasa layanan pada BLUD yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang jasa layanan dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rincian Umur dan penyisihan Piutang Jasa Layanan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.5.1.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2017
Rp 958.399.061,00

Per 31 Desember 2016
Rp768.698.399,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran per 31 Desember 2017 sebesar Rp 958.399.061,00 merupakan nilai tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas Tahun 2010 yang dapat ditagihkan dalam tahun 2017.

5.5.1.11 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2017
Rp 841.710.894,00

Per 31 Desember 2016
Rp44.973.775.145,25

Piutang Lainnya per 31 Desember 2017sebesar Rp841.710.894,00, merupakan piutang pemerintah Kota kepada pihak ketiga atas tunggakan kontribusi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Balikpapan dalam perjanjian kerjasama *Built, Operate and Transfer* (BOT), piutang atas tunggakan penyewaan aset tanah dan bangunan, serta Piutang Gaji Pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 41Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun 2016	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Tahun 2017
1	BOT Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	83.333.33 6,00	125.000.000 ,00	208.333.3 32,00	4,00
2	BOT Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	-	250.000.000 ,00	250.000.0 00,00	-
3	Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	479.335.15 0,00	275.000.000 ,00	25.144.5 05,00	729.190.645, 00
4	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Novotel	-	405.000.000 ,00	405.000.0 00,00	-
5	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Ibis	37.500.00 0,00	120.000.000 ,00	126.250.0 00,00	31.250.000, 00
8	Piutang Laba PDAM	PDAM	-	-	-	-
9	Gaji Pegawai / Taspen	Pegawai Pensiunan	30.365.60 0,00	11.696.50 0,00	30.365.6 00,00	11.696.500, 00
10	Piutang Kerjasama Sewa Kantin / RSUD	Kantin RSUD	-	69.573.74 5,00	-	69.573.745, 00
11	Pekerjaan Drainase SKPD DPU	Drainase Kel. Sepinggan	101.112.43 0,49	-	101.112.4 30,49	-
12	PBB	-	40.765.901.68 7,06	-	40.765.901.68 7,06	-
13	Pajak Hotel	-	1.711.234.49 3,96	-	1.711.234.49 3,96	-
14	Pajak Restoran	-	620.232.03 3,60	-	620.232.0 33,60	-
15	Pajak Hiburan	-	52.288.59 3,50	-	52.288.5 93,50	-
16	Pajak Reklame	-	546.011.89 4,57	-	546.011.8 94,57	-
17	Pajak Penerangan Jalan	-	39.542.61 1,24	-	39.542.6 11,24	-
18	Pajak Mineral Non Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
19	Pajak Air Tanah	-	30.717.72 1,35	-	30.717.7 21,35	-
20	Pajak Parkir	-	165.587.13 1,48	-	165.587.1 31,48	-
21	Pajak Sarang Burung Walet	-	997.6 00,00	-	997.6 00,00	-
22	Pajak BPHTB	-	352.8 62,00	-	352.8 62,00	-

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Tahun
	JUMLAH		44.864.513,14	1.256.270,245	49.079.072,49	861.710.894,00
JUMLAH PENYISIHAN						742.626.996,25
JUMLAH SETELAH PENYISIHAN						99.083.897,76

Pada tahun sebelumnya (saldo awal 2016) terdapat lebih saji piutang Denda pajak yang merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Denda pajak yang tercantum di atas merupakan denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan dari pokok piutang pajak dan maksimal pengenaannya adalah 48% (24 bulan). Seharusnya piutang denda dapat disajikan dengan didasari oleh diterbitkannya ketetapan denda (STPD) sehingga pada tahun 2017 piutang tersebut dilakukan koreksi. Daftar Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 10*

5.5.1.12	Piutang Transfer	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	Pemerintah Daerah	Rp 24.079.328.000,00	Rp87.373.950.354,00
	Lainnya		

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 24.079.328.000,00 merupakan piutang atas Kurang Bayar Bantuan Provinsi Kaltim dan DBH Provinsi Kaltim. Pada tahun sebelumnya terdapat Piutang DBH Pemerintah Pusat yang pada tahun 2017 dieliminasi dari piutang karena metode pengakuan basis kas. Daftar Umur dan mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.5.1.13	Belanja dibayar di muka	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp 1.542.750.482,19	Rp 1.750.323.682,19

Saldo Belanja dibayar di muka sebesar Rp 1.542.750.482,19 merupakan pembayaran atas sewa yang dibayar dimuka yang dibayar kepada pihak III dengan rincian belanjadibayar dimuka sebagai berikut:

Tabel 5. 42Rincian Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Sewa Dibayar Di Muka	1.542.750.482,19	1.672.543.489,59	(129.793.007)
2.	Asuransi Dibayar Di Muka	0,00	77.780.192,60	(77.780.193)
3.	Pembayaran Gedung	-	-	-
Jumlah		1.542.750.482,19	1.750.323.682,19	(1.942.385.922)

Daftar Rincian Belanja Dibayar Di Muka dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.5.1.14	Persediaan	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp 20.099.507.889,78	Rp18.132.670.208,83

Persediaan sebesar Rp 20.099.507.889,78 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada SKPD yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31Desember2017.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik terkecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*.Adapun rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 43Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Alat tulis kantor	2.084.633.140,14	1.879.101.541,97	205.531.598
2.	Blanko/Cetakan	2.137.966.954,00	2.180.078.043,00	(42.111.089)
3.	Benda Berharga	73.184.072,00	4.202.000,00	68.982.072
4.	Obat-obatan	7.725.670.894,65	6.778.346.384,66	947.324.510
5.	Bahan Kimia	707.574.937,23	1.205.838.830,79	(498.263.894)
6.	Bahan Bangunan	340.923.900,72	297.372.859,00	43.551.042
7.	Cadangan Energi	117.269.252,28	82.039.737,95	35.229.514
8.	Alat Kebersihan	228.329.332,42	236.453.814,64	(8.124.482)
9.	Alat Kesehatan	3.155.299.435,56	2.353.022.955,35	802.276.480
10.	Alat listrik	126.565.767,00	163.948.055,00	(37.382.288)
11.	Perlengkapan lapangan	119.683.200,00	251.432.600,00	(131.749.400)
12.	Bahan Makanan dan Minuman	58.154.853,78	65.966.857,97	(7.812.004)
13.	Bibit Tanaman dan Ternak	3.205.557.900,00	2.481.142.350,00	724.415.550
14.	Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga	18.694.250,00	153.724.179,00	(135.029.929)
	Jumlah	20.099.507.889,78	18.132.670.209,33	1.966.837.680

Daftar RincianPersediaan dapat lihat pada *Lampiran 13*.

Dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sisa persediaan pada SKPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Pusat dan BKKBN Provinsi Kaltim seperti pada daftar berikut :

Tabel 5. 44Rincian Persediaan yang bersumber dari BOS Pusat dan BKKBN per 31 Desember 2017

	Uraian	BOS Pusat (Rp)	BKKBN
1.	Alat tulis kantor	233.108.629,00	0.00
2.	Blanko/Cetakan	5.567.500,00	22.843.700
3.	Benda Berharga	2.068.000,00	0.00
4.	Obat-obatan	10.088.500,00	102.566.080
5.	Bahan Kimia	55.000,00	0.00
6.	Bahan Bangunan	325.000,00	0.00
7.	Cadangan Energi	1.730.000,00	0.00
8.	Alat Kebersihan	28.649.860,00	0.00
9.	Alat Kesehatan	1.751.500,00	0.00
10.	Alat listrik	5.118.500,00	0.00
11.	Perlengkapan lapangan	4.636.000,00	0.00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	160.000,00	0.00
13.	Bibit Tanaman Dan Ternak	614.000,00	0.00
	Jumlah	293.872.489,00	409.362.586

5.5.2	Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2017 Rp513.967.872.239,90	Per 31 Desember 2016 Rp 495.981.642.338,58
--------------	---------------------------------	---	--

Investasi Jangka panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp513.967.872.239,90 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut.

	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)
Investasi Non Permanen	6.877.748.730,22	6.856.152.150,65
Penyisihan	(3.983.960.063,25)	(3.975.263.595,00)
Investasi Permanen	511.074.083.572,93	493.100.753.783,93
Jumlah	513.967.872.239,90	495.981.642.338,58

Jumlah Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.877.748.730,22 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp3.983.960.063,25 menjadi Rp2.893.788.666,97 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 45Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2017 (Rp)	Nilai Tahun 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601.001.5991	432.660.900,12	425.679.687,55
2.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601.000.5415	153.378.991,73	153.578.991,73
3.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi	601.001.6052	250.740.589,89	251.395.134,89
4.	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601.001.6056	343.885.331,48	345.185.331,48
5.	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	601.001.5995	202.859.248,12	207.144.661,12
6.	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601.001.6051	175.701.908,55	175.701.908,55
7.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601.001.5994	12.993.805,79	13.193.805,79
8.	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601.001.5212	141.292.630,64	141.492.630,64
9.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601.001.6054	94.270.000,00	94.470.000,00
10.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601.001.3415	56.889.230,42	57.089.230,42
11.	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	601.001.1915	113.735.027,99	113.980.027,99
12.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601.001.5993	1.000.216.921,32	1.000.410.102,32
13.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601.001.6057	3.899.444.144,17	3.876.830.638,17
	Jumlah Dana Bergulir Bruto		6.877.748.730,22	6.888.514.556,22
	Jumlah Penyisihan		3.983.960.063,25	3.501.606.592,17
	Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)		2.893.788.666,97	3.386.907.964,05

Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam Lampiran 14.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Non Permanen-Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/SKPD, yaitu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian serta Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2017 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.877.748.730,22. Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp3.983.960.063,25 sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp2.893.788.666,97
2. Penyediaan Fasilitas Kredit UMKMK sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penjaminan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Penempatan awal penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan ditempatkan dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Kaltim. Penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut tidak disajikan

- dalam Neraca Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak memenuhi definisi operasional Investasi Non Permanen Dana Bergulir sesuai buletin teknis nomor 7 tentang Dana Bergulir. Akun tersebut dikelompokkan padaKas yang dibatasi penggunaannya yang dikelompokkan pada Aset lain-lain.
- Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
 - Nasabah telah meninggal dunia;
 - Nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru;
 - Nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
 - Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10%untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT). SedangkanDana bergulir lainnya sebesar 0%.
 - Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabahtidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesarRp2.951.243.543,56 per 31 Desember 2017.Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank)dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp511.074.083.572,93merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BUMD yangdapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 46Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2017dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kalimantan Timur	107.745.000.000	99.440.000.000,00	8.305.000.000
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	357.004.246.823,00	347.696.678.699	19.582.034.709
3.	Penyertaan pada PERUSDA Kota Balikpapan	46.324.836.750,00	45.964.075.085	(57.288.335)
	Jumlah	511.074.083.573,00	493.100.753.784	27.829.746.374

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp 9.255.935.578,00,- dan kepada Bank Kaltim sebesar Rp8.305.000.000,00. Selain itu dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada BPD Kaltimmenggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perusda Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Rincian Investasi Jangka Panjang dimuat dalam**Lampiran 16**.

5.5.3	ASET TETAP	Per 31 Desember 2017 Rp6.642.144.430.333,21	Per 31 Desember 2016 Rp6.606.725.354.590,36
--------------	-------------------	---	---

Rincian nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapanmenurut jenis Aset TetapPer 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 47Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	2.088.081.468.411,57	0	2.088.081.468.411,57

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
2.	Peralatan dan Mesin	647.857.730.111,65	479.052.864.350,67	168.804.865.760,98
3.	Gedung dan Bangunan	3.877.918.002.272,91	492.086.475.775,00	3.385.831.526.497,91
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.145.957.362.736,69	1.307.428.000.642,35	838.529.362.094,34
5.	Aset Tetap Lainnya	67.879.854.631,19	0	67.879.854.631,19
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	93.017.352.937,22	0	93.017.352.937,22
Jumlah		8.920.711.771.101,23	2.278.567.340.765,83	6.642.144.430.333,21

Jumlah Aset tetap sebesar Rp6.642.144.430.333,21 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 48Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap Per 31 Desember 2017

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
Saldo Aset Tetap 2016 Audited			8.592.130.854.235,15
Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017			2.088.544.732.363,58
a.	Realisasi Belanja Modal 2017	437.282.550.088,42	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	206.860.832,75	
c.	Terima Hibah	14.269.727.190,00	
d.	Terima Mutasi dari SKPD lain	457.251.565.950,12	
e.	Ditemukan/Hasil Inv	12.041.400.631,00	
f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	19.711.923.477,00	
g.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	1.136.214.705.039,29	
h.	Penilaian/Utang	11.565.999.155,00	
Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017			1.759.963.815.497,50
a.	Penghapusan Aset Tetap	6.305.590.570,00	
b.	Mutasi ke SKPD lain	457.251.565.950,08	
c.	Reklasifikasi dari AT ke AL	3.135.770.170,00	
d.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	97.169.450,00	
e.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	1.136.909.923.689,40	
f.	Koreksi	82.146.020,44	
g.	Barang Rusak Berat	802.275.001,70	
h.	Barang di bawah kapitalisasi	13.896.024.671,38	
i.	Penilaian/Utang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	141.483.349.974,50	
Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017			8.920.711.771.101,23
Akumulasi Penyusutan			2.278.567.340.768,02
Nilai Buku Per 31 Desember 2017			6.642.144.430.333,21

- a. Saldo Aset Tetap 2016 Audited sebesar Rp 8.592.130.854.235,15.
- b. Mutasi tambah aset tetap tahun 2017 sebesar Rp2.088.544.732.363,58dijelaskan sebagai berikut
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 437.282.550.088,42yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 50.892.259.853,00 (11,64%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 33.589.762.333,08 (7,68%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp 212.334.253.887,90 (48,56%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 133.252.905.463,00 (30,47%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 7.213.368.551,44 (1,65%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2017 per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 17*

- 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) sebesar Rp 206.860.832,75 Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Rincian Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 14.269.727.90 yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AKB dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Rincian Terima Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**
 - 4) Terima mutasi dari SKPD lain sebesar Rp 457.251.565.950,12. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 12.041.400.631,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 4.384.677.520,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 390.191.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 20.999.999,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 85.031.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp 178.500.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 5.941.775.786,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 95.748.426,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 944.476.900,00. Rincian Terima Ditemukan/Hasil Inventarisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**
 - 6) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 19.711.923.477,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 17.951.923.477,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 1.760.000.000,00. Rincian Reklasifikasi dari AL ke AT per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**
 - 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 1.136.214.705.039,29.
 - 8) Penilaian/Utang sebesar Rp 11.565.999.155,00. Transaksi ini berupa pembayaran sisa utang karena terjadinya defisit anggaran di tahun sebelumnya untuk melunasi pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang menurut realisasi fisik telah selesai sampai pada tanggal 31 Desember 2016 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 11.565.999.155,00. Rincian Penilaian/Utang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 22**
- c. Mutasi kurang aset tetap tahun 2017 sebesar Rp 1.759.963.815.497,50 dijelaskan sebagai berikut
- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 6.305.590.570,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.633.603.250,00 pada Setwan sebesar Rp 118.450.000,00, Setdakot sebesar Rp 466.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 190.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar Rp 190.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Barat sebesar Rp 415.200.000,00, Kecamatan Balikpapan Utara Rp 350.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp 425.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp 230.000.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 150.000.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 114.260.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 228.220.000,00, RSKBSI Rp 197.000.000,00, DP3AKB sebesar Rp 20.000.000,00, DPPP sebesar Rp 100.000.000,00, BPPDRD sebesar Rp 70.000.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 95.000.000,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 176.473.250,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 98.000.000,00. Sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.671.987.320,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Rincian Penghapusan Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**
 - 2) Mutasi ke SKPD lain sebesar Rp 457.251.565.950,12. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 3) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 3.135.770.170,00 yang terdiri dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp 40.595.000,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.095.175.170,00. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**

- 4) Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya sebesar Rp 97.169.450,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
 - 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 1.136.909.923.689,40.
 - 6) Koreksi sebesar Rp 82.146.020,44 pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akibat kesalahan dalam penganggaran dalam Belanja Modal DJKN dan BLUD.
 - 7) Barang Rusak Berat sebesar Rp 802.275.001,70 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 802.275.001,70 yang terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 536.436.999,70, Bappeda Litbang sebesar Rp 265.838.002,00. Rincian barang rusak berat secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 26**
 - 8) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp 13.896.024.671,38 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.432.746.275,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 743.657.462,38, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 52.308.025,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 8.667.312.909,00.
 - 9) Penilaian/Utang sebesarRp 141.483.349.974,50 yang merupakan sisa pembayaran utang karena terjadinya defisit anggaran di tahun sebelumnya untuk melunasi pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang menurut realisasi fisik telah selesai sampai pada tanggal 31 Desember 2016, yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.359.645.200,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 106.171.499.340,30 dan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 30.952.205.434,20. Sedangkan Rp 11.565.999.155,00 merupakan utang yang besarnya dicatat sebagai nilai perolehan aset tetap tanah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017.
- d. Terdapat Aset Tetap sebesar Rp 413.974.860.074,90 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp 210.770.672.238,36 dan 6 SMK sebesar Rp 201.160.694.836,59 dan 1 SLB sebesar Rp 2.043.492.999,95 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
- e. Penjelasan selisih tambah kurang antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap (dana aset lainnya) dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing masing sebesar **Rp 8.920.711.771.101,23** dan **Rp 8.592.130.854.235,00**. Secara Umum aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 328.580.916.866,00 sementara realisasi belanja modal sebesar Rp 451.891.556.091,00.

Terdapat selisih kurang sebesar Rp 123.310.639.226,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 49Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap

Uraian		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
a.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	206.860.833	
b.	Terima Hibah	14.269.727.190,00	
c.	Terima Mutasi dari SKPD lain		
d.	Ditemukan/Hasil Inv	12.041.400.631,00	
e.	Diserahkan/Dihibahkan		
f.	Penghapusan Aset Tetap		6.305.590.570,00
g.	Mutasi ke SKPD lain		
h.	Reklasifikasi dari AT ke AL		3.135.770.170,00
i.	Reklasifikasi dari AL ke AT	19.711.923.477,00	
j.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	1.136.214.705.038,00	1.136.909.923.689,00
k.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya		97.169.450,00
l.	Koreksi		82.146.020,00
m.	Barang Rusak Berat		802.275.002,00

Uraian		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
n.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut		
o.	Barang di bawah kapitalisasi		13.896.024.671,00
p.	Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA		
q.	Penilaian/Utang	11.565.999.155,00	141.483.349.975,00
Jumlah		1.194.010.616.324,00	1.302.712.249.547,00
Selisih Tambah Kurang			(108.701.633.223,00)
Belanja Modal Aset Lainnya			8.140.413.950,00
Belanja BOSPUS			6.468.592.053,00
Total Selisih Tambah Kurang			(123.310.639.226,00)

5.5.3.1
TANAH

Per 31 Desember 2017

Rp 2.088.081.468.411,57

Per 31 Desember 2016

Rp 2.019.383.173.117,57

Nilai Buku Aset Tetap berupa Tanah Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 2.088.081.468.411,57 dan Rp 2.019.383.173.117,57 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2017sebesar Rp. 68.698.295.294,00.Nilai tercatat (*carrying amount*)Aset tetap berupa Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan. Aset Tetap berupa Tanah tidak disusutkan.Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2017 sebesar Rp 2.088.081.468.411,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tanah 2016 Audited		2.019.383.173.117,57
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017		
	a. Realisasi Belanja Modal Tanah 2017	50.892.259.853,00	
	b. Mutasi dari SKPD lain	133.204.676.006,36	
	c. Ditemukan/Hasil Inv	5.867.113.286,00	
	d. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	379.509.000,00	
	e. Penilaian/Hutang	11.565.999.155,00	
			201.909.557.300,36
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017		
	a. Mutasi Ke SKPD lain	133.204.676.006,36	
	b. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	6.586.000,00	
			133.211.262.006,36
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017		2.088.081.468.411,57

- a. Saldo Aset Tetap Tanah 2016 Audited sebesar Rp 2.019.383.173.117,57
- b. Mutasi tambah aset tetap tanah tahun 2017sebesar Rp 201.909.557.300,36 dijelaskan sebagai berikut :
 - Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 50.892.259.853,00yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 18.034.490.832,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 32.822.505.521,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 35.263.500,00.
 - Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 133.204.676.006,36.Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.

- 3) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 5.867.113.286,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 379.509.000,00.
 - 5) Penilaian/Hutang sebesar Rp 11.565.999.155,00 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- c. Mutasi kurang aset tetap tanah tahun 2017 sebesar Rp 133.211.262.006,36 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 133.204.676.006,36. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi dari SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 2) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 6.586.000,00.
- d. Aset tetap berupa tanah senilai Rp 113.302.840.000,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah sebanyak 9 SMA dengan nilai sebesar Rp 54.479.242.000,00 dan sebanyak 5 SMK dengan nilai sebesar Rp57.823.598.000,00 dan 1 SLB dengan nilai tanah sebesar Rp 1.000.000.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 51 Saldo Aset Tetap Tanah Yang Dialihkan Ke Provinsi per 31 Desember 2017

No.	Nama Sekolah	ASET TETAP (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	5.873.100.000.00
2	SMA Negeri 2	412.900.000.00
3	SMA Negeri 3	2.402.550.000.00
4	SMA Negeri 4	9.190.000.000.00
5	SMA Negeri 5	2.800.000.000.00
6	SMA Negeri 6	9.000.000.000.00
7	SMA Negeri 7	1.273.500.000.00
8	SMA Negeri 8	1.280.000.000.00
9	SMA Negeri 9	22.247.192.000.00
	Jumlah I	54.479.242.000.00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	27.000.000.000.00
2	SMK Negeri 2	4.240.000.000.00
3	SMK Negeri 3	9.007.598.000.00
4	SMK Negeri 4	8.792.000.000.00
5	SMK Negeri 5	8.784.000.000.00
	Jumlah II	57.823.598.000.00
1	SLB Negeri	1.000.000.000.00
	Jumlah III	1.000.000.000.00
TOTAL		113.302.840.000.00

5.5.3.2 PERALATAN DAN MESIN	Per 31 Desember 2017 Rp647.857.730.111,65	Per 31 Desember 2016 Rp 616.980.039.780,27
------------------------------------	--	---

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 647.857.730.111,65 dan Rp 616.980.039.780,27 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2017 sebesar Rp 30.877.690.331,38.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk peralatan dan mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 sebesar Rp 647.857.730.111,65 terdiri dari Alat-alat Besar sebesar Rp 66.643.997.320,68, Alat-alat Angkutan sebesar Rp 149.921.864.514,34, Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp 10.135.956.201,35, Alat Pertanian sebesar Rp 11.884.447.975,29, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 251.710.078.430,83, Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp 28.995.402.612,50, Alat-alat Kedokteran sebesar Rp 67.432.102.474,86, Alat Laboratorium sebesar Rp 59.284.738.283,81, Alat-alat Persenjataan/Keamanan sebesar Rp 1.849.142.298,00.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2017 sebesar Rp 647.857.730.111,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 52 Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2017			
No.	Uraian		Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin 2016 Audited		616.980.039.780,27
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017		
	a.	Realisasi Belanja Modal 2017	33.589.762.333,08
	b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	136.939.880,00
	c.	Terima Hibah	5.164.496.729,00
	d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	70.388.728.959,48
	e.	Ditemukan/Hasil Inv	1.375.409.419,00
	f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	1.760.000.000,00
	g.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	2.636.710.346,00
		Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi	115.052.047.666,56
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017		
	a.	Penghapusan Aset Tetap	3.633.603.250,00
	b.	Mutasi Ke SKPD lain	70.388.728.959,48
	c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	557.358.650,00
	d.	Barang Rusak Berat	802.275.001,70
	e.	Barang di bawah kapitalisasi	4.432.746.274,04
	f.	Hutang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	4.359.645.200,00
		Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi	84.174.357.335,18
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017		647.857.730.111,65
V.	Akumulasi Penyusutan		479.052.864.350,67
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2017		168.804.865.760,98

- a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2016 Audited sebesar Rp 616.980.039.780,27.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp115.052.047.666,56 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 33.589.762.333,08 yang terdiri dari Sekretariat Dewan sebesar Rp 989.378.500,00, Setdakota sebesar Rp 776.771.700,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 1.206.464.574,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 3.678.221.250,00, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 16.080.000,00, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp 113.710.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 1.131.333.000,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 970.960.170,00, Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu sebesar Rp 1.235.053.582,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 2.018.579.447,08, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 10.050.826.350,00, Dinas Sosial sebesar Rp 211.276.000,00, DP3AKB sebesar Rp 19.734.000,00, DKUMKMP sebesar Rp 432.500.300,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 83.161.700,00, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp 10.000.000,00, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 104.879.940,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 288.358.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 318.336.000,00, Inspektorat Kota sebesar Rp 4.000.000,00, Bappeda Litbang sebesar Rp 563.887.640,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 8.684.655.600,00, Disporapar sebesar Rp 70.398.000,00, BKPSDM sebesar Rp 21.540.000,00, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 57.279.200,00, Diskominfo sebesar Rp 499.448.880,00.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa kapitalisasi sebesar Rp 136.939.880,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 136.939.880,00.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 5.164.496.729,00 dengan rincian Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp 13.500.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 4.883.654.729,00, Dan DP3AKB sebesar Rp 267.342.000,00.
 - 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 70.388.728.959,48. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 1.375.409.419,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 334.677.520,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 20.999.999,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 85.031.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp 178.500.000,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 756.200.900,00.
 - 6) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 1.760.000.000,00 merupakan alat berat berupa bulldozer yang sebelumnya oleh pengguna barang pada Dinas Lingkungan Hidup diakui dengan kondisi Rusak Berat namun setelah dilakukan verifikasi fisik di lapangan didapatkan bahwa asset tersebut dalam kondisi baik.
 - 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 16.444.238.281,73.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp 84.174.357.335,18 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.633.603.250,00 yang terdiri dari Setwan sebesar Rp 118.450.000,00, Setdakot sebesar Rp 466.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 190.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar Rp 190.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Barat sebesar Rp 415.200.000,00, Kecamatan Balikpapan Utara sebesar Rp 350.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp 425.000.000,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp 230.000.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 150.000.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 114.260.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 228.220.000,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 197.000.000,00, DP3AKB sebesar Rp 20.000.000,00, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 100.000.000,00, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp

70.000.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 95.000.000,00, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 176.473.250,00.

- 2) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 70.388.728.959,48. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi dari SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap.
 - 3) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 557.358.650,00.
 - 4) Barang Rusak Berat sebesar Rp 802.275.001,70 merupakan peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 536.436.999,70, Bappeda Litbang sebesar Rp 265.838.002,00 yang kondisinya sudah rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi dan telah proses penghapusan.
 - 5) Koreksi kurang sebesar Rp 4.432.746.275,00 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
 - 6) Penilaian/Utang sebesar Rp 4.359.645.200,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Transaksi ini berupa pembayaran sisa utang karena terjadinya defisit anggaran di tahun sebelumnya untuk melunasi pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang menurut realisasi fisik telah selesai sampai pada tanggal 31 Desember 2016.
- d. Terdapat Aset Tetap sebesar Rp 41.935.819.961.62 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sebanyak 9 SMA sebesar Rp 21.259.281.411.38, 6 SMK sebesar 19.961.763.550.23 dan 1 SLB sebesar 714.775.000.00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 53 Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Yang Dialihkan Ke Provinsi Per 31 Desember 2017

No.	Nama Sekolah	Tanah (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	2.538.244.553.00
2	SMA Negeri 2	3.165.616.259.40
3	SMA Negeri 3	1.604.714.302.33
4	SMA Negeri 4	2.048.212.124.98
5	SMA Negeri 5	1.316.379.310.50
6	SMA Negeri 6	3.865.491.263.75
7	SMA Negeri 7	1.656.923.376.76
8	SMA Negeri 8	2.205.355.039.33
9	SMA Negeri 9	2.858.345.181.33
	Jumlah I	21.259.281.411.38
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	3.756.037.643.55
2	SMK Negeri 2	4.004.211.698.00
3	SMK Negeri 3	2.445.298.036.00
4	SMK Negeri 4	2.625.278.561.64
5	SMK Negeri 5	3.066.921.650.05
6	SMK Negeri 6	4.064.015.961.00
	Jumlah II	19.961.763.550.23
1	SLB Negeri	714.775.000

No.	Nama Sekolah	Tanah (Rp)
		.00
	Jumlah III	714.775.000.00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		41.935.819.961.62

5.5.3.3
GEDUNG DAN BANGUNAN

Per 31 Desember 2017

Rp 3.877.918.002.272,91

Per 31 Desember 2016

Rp 2.658.415.865.390,84

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 3.877.918.002.272,91 dan Rp2.658.415.865.390,84merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung.Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2017 sebesar Rp 1.219.502.136.882.07

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000,00 ke atas.

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017sebesar Rp 3.877.918.002.272,91terdiri dari Bangunan Gedung sebesar Rp 3.712.892.978.247,77, Monumen sebesar Rp 22.920.337.400,34, Bangunan Gedung Lainnya sebesar Rp 142.104.686.624,79.Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada pada Tahun 2017 sebesar Rp 3.877.918.002.272,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Nilai Aset Gedung Dan Bangunan Per 31 Desember 2017				
No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2016 Audited			2.658.415
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017			
	a.	Realisasi Belanja Modal 2017	212.334.253.887,90	
	b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	69.920.952,75	
	c.	Terima Hibah	110.549.000,00	
	d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	239.506.555.165,29	
	e.	Ditemukan/Hasil Inv	4.610.601.926,00	
	f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	9.282.143.212,46	
	g.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.108.667.551.095,64	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi			1.574.581
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017			
	a.	Penghapusan Aset Tetap	2.671.987.320,00	
	b.	Mutasi Ke SKPD lain	239.506.555.165,29	
	c.	Reklasifikasi dari AT ke AL	40.595.000,00	
	d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	5.945.144.070,00	
	e.	Barang di bawah kapitalisasi	743.657.462,38	
	f.	Hutang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	106.171.499.340,30	

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi	355.079.438.357,97	
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017	3.877.918.002.272,91	
V.	Akumulasi Penyusutan		492.086
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2017		3.385.831

- a. Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2016 Audited sebesar Rp 2.658.415.865.390,84.
- b. Mutasi tambah aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2017 sebesar Rp 1.574.581.575.240,04 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 212.334.253.887,90 yang terdiri dari Sekretariat Dewan sebesar Rp 293.374.500,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 176.978.420.246,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 890.631.400,00, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 1.677.161.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 1.488.636.576,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 516.816.410,00, Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu sebesar Rp 190.191.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 13.957.104.659,90, DP3AKB sebesar Rp 230.703.000,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 1.508.505.223,00, DKUMKMP sebesar Rp 11.331.922.773,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 1.409.151.100,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 144.523.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.056.556.000,00, Disporapar sebesar Rp 660.557.000,00.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 69.920.952,75.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 110.549.000,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 110.549.000,00.
 - 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp. 239.506.555.165,29.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inv sebesar Rp 4.610.601.926,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 4.050.000.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 390.191.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 74.662.500,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 95.748.426,00.
 - 6) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 9.282.143.212,46 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
 - 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 1.108.667.551.095,64.
- c. Mutasi kurang aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2017 sebesar Rp. 355.079.438.357,97 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 2.671.987.320,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 2.671.987.320,00.
 - 2) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp. 239.506.555.165,29
 - 3) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp.40.595.000,00 yang terdiri dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebesar Rp 40.595.000,00.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp.5.945.144.070
 - 5) Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum sebesar Rp. 743.657.462,38 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap gedung dan bangunan yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 183.973.999,48, Dinas Perhubungan sebesar Rp 378.064.500.00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 147.042.999,90, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 9.504.573,00, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebesar Rp 20.071.390,00, dan Dinas Perdagangan sebesar Rp 5.000.000,00.

- 6) Hutang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang) sebesar Rp.106.171.499.340,30 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 99.005.248.612,30, Dinas Kesehatan sebesar Rp 258.316.650,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6.907.934.078,00.
- d. Terdapat Aset Tetap Gedung Bangunan terdapat sebesar Rp. 252.895.478.867,33 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp. 130.972.689.255,98 dan 6 SMK sebesar Rp. 121.643.495.611,35 dan 1 SLB sebesar Rp. 279.294.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 55 Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Yang Dialihkan Ke Provinsi Per 31 Desember 2017

No.	Nama Sekolah	Bangunan Dan Gedung (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	12.109.225.400,09
2	SMA Negeri 2	17.355.541.278,50
3	SMA Negeri 3	10.864.588.890,55
4	SMA Negeri 4	9.862.535.020,55
5	SMA Negeri 5	16.864.233.425,63
6	SMA Negeri 6	7.070.747.964,09
7	SMA Negeri 7	13.524.876.478,09
8	SMA Negeri 8	6.747.654.314,94
9	SMA Negeri 9	36.573.286.483,53
	Jumlah I	130.972.689.255,98
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	30.347.221.168,09
2	SMK Negeri 2	6.030.207.055,09
3	SMK Negeri 3	9.397.920.162,67
4	SMK Negeri 4	14.062.312.497,28
5	SMK Negeri 5	14.014.154.675,22
6	SMK Negeri 6	47.791.680.053,00
	Jumlah II	121.643.495.611,35
1	SLB Negeri	279.294.000,00
	Jumlah III	279.294.000,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		252.895.478.867,33

5.5.3.4
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Per 31 Desember 2017

Rp 2.145.957.362.736,69

Per 31 Desember 2016

Rp 2.013.457.099.489,74

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp 2.145.957.362.736,69** dan **Rp2.013.457.099.489,74** yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada TA 2017 sebesar **Rp 132.500.263.246.95**.Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas.

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp 1.410.018.067.034,42, Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp. 644.589.450.693,31, Instalasi sebesar Rp. 32.770.487.190,65, Jaringan sebesar Rp. 58.350.166.818,31 dan Taman sebesar Rp. 229.191.000,00.

Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan Irigasi pada Tahun 2017 sebesar Rp **2.145.957.362.736,69** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi Per 31 Desember 2017

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi 2016 Audited			2.013.457.099.489,74
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017			
	a.	Realisasi Belanja Modal 2017	133.252.905.463,00	
	b.	Terima Mutasi dari SKPD lain	10.885.451.568,99	
	c.	Ditemukan hasil inventarisasi	188.276.000,00	
	d.	Reklasifikasi dari AL ke AT	8.669.780.264,95	
	e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	22.512.991.429,09	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi			175.509.404.725,14
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			
	a.	Mutasi ke SKPD lain	10.885.451.568,99	
	b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.022.007.000,00	
	c.	Reklasifikasi dari persediaan	97.169.450,00	
	d.	Barang di bawah kapitalisasi	52.308.025,00	
	e.	Hutang	30.952.205.434,20	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi			43.009.141.478,19
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017			2.145.957.362.736,69
V.	Akumulasi Penyusutan			1.307.428.000.642,35
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2017			838.529.362.094,34

- a. Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2016 Audited sebesar Rp 2.013.457.099.489,74.
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2017 sebesar Rp. 175.509.404.725,14 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 133.252.905.463,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 311.536.375,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 124.137.362.657,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 179.917.000,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 1.078.903.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 48. 814.123,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 1.482.966.000,00, DKUMKMP sebesar Rp 4.840.817.507,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 370.333.923,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 179.909.128,00.
 - 2) Terima Mutasi dari SKPD lain sebesar Rp 10.885.451.568,99
 - 3) Ditemukan hasil inventarisasi sebesar Rp. 188.276.000,00 yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 188.276.000,00.
 - 4) Reklasifikasi AL ke AT sebesar Rp 8.669.780.264,06 merupakan jalan kota yang sebelumnya pada tahun 2016 diakui sebagai jalan milik pemerintah pusat, sehingga direklas kembali ke asset tetap pada tahun 2017 dikarenakan merupakan jalan milik pemerintah kota balikpapan pada dinas pekerjaan umum.

- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 22.512.991.429,09 termasuk reklas asset berupa IPAL pada Rumah Sakit Klinik Sayang Ibu sebesar Rp 73.013.000,00 yang di reklas dari asset tetap lainnya (asset renovasi) ke Aset Tetap pada Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2017 sebesar Rp 43.009.141.478,19 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Mutasi ke SKPD lain sebesar Rp 10.885.451.568,99
 - 2) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 1.022.007.000,00
 - 3) Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp 97.169.450,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum.
 - 4) Koreksi kurang Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibawah nilai minimum Barang di bawah kapitalisasi sebesar Rp 52.308.025,00 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 11.254.375,00, Kecamatan Balikpapan Barat sebesar Rp 18.700.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 7.491.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 4.412.650,00 dan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebesar Rp 10.450.000,00.
 - 5) Penilaian/Utang(Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang) sebesarRp.30.952.205.434,20 dari Dinas Pekerjaan Umum.
- d. TerdapatAset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 405.504.148,00 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp. 282.841.848,00 dan 6 SMK sebesar Rp. 122.662.300,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 57 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Yang Dialihkan Ke Provinsi Per 31 Desember 2017

No.	Nama Sekolah	Jalan, Jaringan dan Irigasi
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	-
2	SMA Negeri 2	-
3	SMA Negeri 3	36.787.000,00
4	SMA Negeri 4	69.877.000,00
5	SMA Negeri 5	-
6	SMA Negeri 6	120.777.848,00
7	SMA Negeri 7	-
8	SMA Negeri 8	-
9	SMA Negeri 9	55.400.000,00
	Jumlah I	282.841.848,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	40.000.000,00
2	SMK Negeri 2	-
3	SMK Negeri 3	45.413.000,00
4	SMK Negeri 4	-
5	SMK Negeri 5	37.249.300,00
6	SMK Negeri 6	-
	Jumlah II	122.662.300,00
1	SLB Negeri	-
	Jumlah III	-

No.	Nama Sekolah	Jalan, Jaringan dan Irigasi
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		405.504.148,00

5.5.3.5 ASET TETAP LAINNYA	Per 31 Desember 2017 Rp 67.879.854.631,19	Per 31 Desember 2016 Rp 67.053.909.229,19
---	--	--

Nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp 67.879.854.631,19**dan **Rp67.053.909.229,19**yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada TA 2017 sebesar Rp 825.945.402,00.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp 67.879.854.631,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya 2016 Audited		67.053.909.229,19
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017		
	a. Realisasi Belanja Modal 2017	7.213.368.551,44	
	b. Terima Hibah	8.994.681.461,00	
	c. Terima Mutasi dari SKPD Lain	3.266.154.250,00	
	d. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	17.987.350,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		19.492.191,612,44
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017		
	a. Mutasi Ke SKPD lain	3.266.154.250,00	
	b. Reklasifikasi dari AT ke AL	3.095.175.170,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	3.555.457.861,00	
	d. Koreksi	82.146.020,44	
	e. Barang di bawah kapitalisasi	8.667.312.909,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		18.666.246.210,44
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017		67.879.854.631,19

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya 2016 Audited sebesar Rp 67.053.909.229,19
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp. 17.926.501.218,00dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2017 sebesar Rp 7.213.368.551,44 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 47.410.000,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 25.300.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 379.778.000,00, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 335.873.400,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 744.865.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 549.862.500,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 1.565.690.394,44, Rumah Sakit Klinik Sayang Ibu sebesar Rp 1.100.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 1.035.540.487,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 540. 602.500,00, DKUMKMP sebesar Rp 144.192.000,00, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 230.626.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar

- Rp 49.912.500,00, Bappeda Litbang sebesar Rp 283.954.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 949.960.000,00, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 220.644.270,00, Diskominfo sebesar Rp 108.047.500,00.
- 2) Terima Hibah sebesar Rp. 8.994.681.461,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 3.266.154.250,00.
 - 4) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp 17.987.350,00.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp. 18.666.246.210,44 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 3.266.154.250,00.
 - 2) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 3.095.175.170,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 47.410.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 379.788.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 335.873.400,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 744.865.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 549.862.500,00, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebesar Rp 144.192.000, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah sebesar Rp 230.626.000,00, Bada Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 49.912.500,00, Bappeda Litbang sebesar 283.954.000,00, Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp 220.644.270,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 108.047.500,00.
 - 3) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp. 3.555.457.861,00.
 - 4) Barang di bawah kapitalisasi sebesar Rp 8.667.312.909,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Terdapat Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.435.217.097,95 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp. 3.776.617.723,00 dan 6 SMK sebesar Rp. 1.609.175.375,00 dan 1 SLB sebesar Rp. 49.423.999,95 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 59 Saldo Aset Tetap Lainnya Yang Dialihkan Ke Provinsi Per 31 Desember 2017

No.	Nama Sekolah	Aset Tetap Lainnya
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	388.047.500,00
2	SMA Negeri 2	404.079.214,00
3	SMA Negeri 3	172.952.900,00
4	SMA Negeri 4	500.843.662,00
5	SMA Negeri 5	25.435.355,00
6	SMA Negeri 6	987.555.766,00
7	SMA Negeri 7	45.921.100,00
8	SMA Negeri 8	1.071.588.130,00
9	SMA Negeri 9	180.194.096,00
	Jumlah I	3.776.617.723,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	193.797.580,00
2	SMK Negeri 2	203.298.567,00
3	SMK Negeri 3	61.512.688,00
4	SMK Negeri 4	212.836.083,00
5	SMK Negeri 5	934.765.957,00

No.	Nama Sekolah	Aset Tetap Lainnya
6	SMK Negeri 6	2.964.500,00
	Jumlah II	1.609.175.375,00
1	SLB Negeri	49.423.999,95
	Jumlah III	49.423.999,95
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		5.435.217.097,95

5.5.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Per 31 Desember 2017 Rp 93.017.352.937,22	Per 31 Desember 2016 Rp 1.216.840.767.227,79
----------------	------------------------------------	---	--

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.017.352.937,22dan Rp1.216.840.767.227,79yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.Terdapat penurunan nilaiAset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2017sebesar Rp 1.123.823.414.290,57 dikarenakan mengikuti realisasi fisik tahun berjalan sehingga di reklas menjadi Aset Tetap.Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2017 sebesar Rp 93.017.352.938,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaanper 31 Desember 2017

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 2016 Audited			1.216.840.767.227,79
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2017			
	a.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.999.955.820,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi			1.999.955.820,00
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2017			
	a.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.125.823.370.110,57	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi			1.125.823.370.110,57
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2017 (I+II-III)			93.017.352.937,22

- a. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 2016 Audited sebesar Rp 1.216.840.767.227,79
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2017berupa Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesarRp. 1.999.955.820,00.
- c. Mutasi kurang Konstruksi Dalam PengerjaanTahun 2017berupaReklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesarRp. 1.125.823.370.110,57

Penjelasan Tambahan :

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebabkan terjadinya perampingan dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Akibat terjadinya perubahan tersebut, juga mengakibatkan terjadinya perpindahan/mutasi barang.

5.5.4	ASET LAINNYA	Per 31 Desember 2017 Rp331.251.658.054,13	Per 31 Desember 2016 Rp 358.171.595.963,81
--------------	---------------------	---	--

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2017. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2017 Rp2.488.801.655,92	Per 31 Desember 2016 Rp3.706.145.682,09
----------------	-----------------------------------	---	---

Tagihan Penjualan Angsuran per 31Desember2017sebesar Rp 2.488.801.655,92 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa Rumah Dinas berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-52/2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Walikota Balikpapan tentang Penjualan rumah Daerah Gol III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemkot Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tgl 8 Januari2010.

Nilai tagihan penjualan angsuran Tahun 2017, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 61Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2017 dan 2016			
Uraian	Nilai TPA		Bertambah
	TA 2017	TA 2016	(Berkurang)
Tagihan penjualan angsuran	5.883.558.799,00	6.576.498.377,00	(692.939.578)
Penyisihan	(3.394.757.143,08)	(2.870.352.694,92)	(524.404.448)
Tagihan penjualan angsuran Neto	2.488.801.655,92	3.706.145.682,09	(1.217.344.026)

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada *Lampiran 28&29*

5.5.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	Per 31 Desember 2017 Rp607.610.211,06	Per 31 Desember 2016 Rp0.00
----------------	----------------------------	---	---------------------------------------

Tuntutan Ganti Rugi per31 Desember 2017 setelah penyisihansebesar Rp607.610.211,06 adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang merupakan tagihan atas kerugianPemerintah Kota Balikpapan yang belum dilunasi seluruhnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK pembebanan, SKTJM dan putusan pengadilan.

Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2017, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 62Rincian Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2017 dan 2016		
Uraian	Jumlah (Rp)	
	TA 2017	TA 2016
Tuntutan Ganti Rugi	765.511.188,84	1.639.971.771,66
Penyisihan	(157.900.977,78)	(1.639.971.771,66)
Nilai Bersih	607.610.211,06	0.00

Rincian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
----------------------	----------------------

5.5.4.3

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp145.500.096.000,00

Rp145.500.096.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa *Built, Operate, and Transfer (BOT)*per 31 Desember2017sebesar Rp145.500.096.000,00merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang diserahkan untuk dikelola.Adapun aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

Tabel 5. 63Rincian Aset yang dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1.	PT HASTA KREASI MANDIRI No. 180/1060/Huk/2001 No.014/LGL/SPK/HKM/VII/01 23-07-2001 No. 180/1060.A/Huk/2001 No.147/LGL/ADD-SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
2.	PT BINTANG HYTIEN JAYA No.180/16/Pemkot-Perj/III/2004 No. 078/BHJ-Perj III/2004 29-03-2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
3.	PT HASTA KREASI MANDIRI No. 644.1/1087/PP/XII/2004 No.060/LGL/HKM-PKS/XII/200415-12-2004 No. 644.1/1087.A/PP/2007 No.017/LGL/HKM-AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
4.	PT GUSHER MITRA SEJAHTERA No. 030/59/PP-II/2007 No.001-PK/GNS-Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
	Jumlah	145.500.096.000,00	749.442.450.000,00	145.500.096.000,00	

5.5.4.4

Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2017

Per 31 Desember 2016

Rp 138.486.337.085,60

Rp 136.411.293.488,76

Nilai Buku Aset Tidak Berwujud tahun 2017sebesar Rp 62.043.392.694,60. Perhitungan Nilai Buku Aset tidak berwujud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 64Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2017	Nilai Buku Per 31 Desember 2017
Aset Tak Berwujud	138.486.337.085,60	76.442.944.391,00	62.043.392.694,60

Nilai Perolehan mutasi aset tidak berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 65Mutasi Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2017

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2017	Mutasi Kurang Tahun 2017	Saldo Akhir Per 31 Des 2017
Aset Tak Berwujud	136.411.293.488,76	36.910.046.002,00	34.835.002.405,16	138.486.337.085,60

5.5.4.5 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2017

Rp120.611.757.492,56

Per 31 Desember 2016

Rp121.380.702.695,60

Aset lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp120.611.757.492,56adalah nilai aset lain-lain Pemerintah Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 66Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	2.773.442.054,45	Semula dicatat dalam kelompok investasi non permanen-dana bergulir
2.	Persediaan Obat Kadaluwarsa	1.419.058,72	Persediaan Obat RSKB Sayang Ibu yang <i>expired</i>
3.	Saldo Aset Tetap yang menunggu penghapusan	83.460.394.370,74	Merupakan Aset yang diusulkan untuk dihapus
4.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	671.311.591,00	Aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut
5.	Aset tetap sengketa yang dimenangkan penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incraht</i>), namun masih dalam proses penghapusan	22.644.000.000,00	a. Tanah Taman Bekapai (Eks. Lapangan Veteran), luas 4.800 M2 senilai 12.000.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 592 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Januari 2003 yang amar putusnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yakni Pemerintah Kota Balikpapan. b. Tanah Pasar Blauran dan sebagian Pasar Ikan Klandasan seluas 27.096 M2 senilai Rp40.644.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 2204K/Pdt/2007 tanggal 2 Juni 2009 yo putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 639 PK/Pdt/2010 tanggal 11 April 2011.
6.	Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	8.696.000.000,00	Reklasifikasi dari Investasi Permanen
7.	Uang Jaminan Reklame dan Uang Jaminan Sewa Rusunawa	2.365.190.417,65	a. Jaminan reklame yang bertujuan untuk jaminan pembongkaran konstruksi reklame pada OPD DPMP2T senilai Rp1.988.735.417,65 b. Jaminan sewa rusunawa apabila penyewa tidak membayar tagihan selama tiga bulan berturut-turut pada OPD Disperkim senilai RP376.455.000,-
	Jumlah	120.611.757.492,56	

Penjelasan aset lain-lain :

Kas Yang Dibatasi Penggunaannyaper 31Desember2017 sebesar Rp2.773.442.054,45merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi di Kota Balikpapan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bank Kaltim dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 180/Hk/XI/2006, Nomor 077/BPD-PST/PRJ/XI/2006, Nomor PPK/PKS/28/XI/2006 tanggal 29 November 2006. Menurut isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet, sedangkan sisanya ditanggung oleh Bank Kaltim sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%.

Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	Rp8.696.000.000,00
--	---------------------------

Penyertaan modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemkot Balikpapan menjadi aset lain-lain per 31 Desember 2013. Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Walikota Balikpapan, Walikota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut:

1. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat dihadapan ADI GUNAWAN, SH, notaris di Balikpapan para Pihak telah mendirikan Perseroan Terbatas ‘PT PELAYARAN BINTANG KALTIM TRANSPORT’ berkedudukan di Balikpapan;
 - b. Bahwa Perseroan Terbatas tersebut hingga saat ini masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi pendiri;
 - c. Bahwa oleh karena hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada instansi yang berwenang maka berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum.
 - d. Bahwa oleh karena PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum maka para pendiri bermaksud untuk mengadakan pemberesan dengan jalan menjual semua aset atas nama PT Bintang Kaltim Transport tersebut.
2. Bermufakat untuk:
 - a. Menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tetapi tidak terbatas pada 2(dua) unit kapal;
 - b. Menunjuk Kantor Pelayanan Lelang Negara untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos-ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;
 - c. Apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya-biaya/ongkos-ongkos yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;
 - d. Menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset;
 - e. Tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut Pos Investasi Permanen Kapal Fery Cepat disajikan pada pos aset lain-lain.

5.5.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Per 31 Desember 2017 Rp53.373.318.626,52	Per 31 Desember 2016 Rp 278.056.183.849,67
--	--	--

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2017 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Pendapatan diterima di muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.5.1.1 Pendapatan Diterima Di Muka	Per 31 Desember 2017 Rp 2.453.148.084,85	Per 31 Desember 2016 Rp10.745.942.080,65
--	--	--

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketigayang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang baru akan diberikan pada periode-periode berikutnya. Pendapatan diterima di muka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 67Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016

N O	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2017 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2016 (Rp)	MUTASI TAMBAH
1	BPKD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan	245.318.400,00	134.636.800,00	110.681.600,00
2	DISNAKERSOS	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	165.720.476,71	85.674.945,75	80.045.530,96
3	DPU	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	207.780.821,92	21.952.814,90	185.828.007,02
4	DINAS PASAR	Sewa Petak Pasar	20.056.842,10	40.468.421,05	(20.411.578,95)
5	DISPENDA	Pajak Reklame	599.745.769,88	351.431.136,60	248.314.633,28
6	RSUD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	29.221.674,88	29.211.822,66	9.852,22
7	BPBD	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	474.562.744,16	288.125.544,13	186.437.200,03
8	BPMP2T	Izin Gangguan dan Keramaian	-	9.053.129.591,58	(9.053.129.591,58)
9	DISHUB	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.742.955,20	741.311.003,97	(40.568.048,77)
10	BPKD	BOT Pasar Baru Square	9.998.400,00	-	9.998.400,00
JUMLAH			2.453.148.084,85	10.745.942.080,64	(8.292.793.995,79)

Daftar mutasi pendapatan diterima di muka Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran31*

5.5.5.1.2 Utang Belanja	Per 31 Desember 2017 Rp 48.436.364.533,98	Per 31 Desember 2016 Rp 151.843.895.109,03
--------------------------------	---	--

Utang Belanja sebesar Rp 48.436.364.533,98 merupakan kewajiban yang belum dibayarkan sampai periode tahun anggaran 2017 berakhir. Utang Belanja terdiri atas :

1. Belanja jasa listrik, air, telpon, internet dan barang jasa lainnya pada beberapa SKPD.
2. Utang tunjangan kerja PNS dan Gaji Tenaga Bantuan
3. Utang jasa layanan pada BLUD
4. Utang Belanja modal.

Rincian Utang Belanja SKPD per 31 Desember 2017 dapat dilihat di *Lampiran 32* sedangkan Utang pada BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 33*

5.5.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	Per 31 Desember 2017 Rp2.485.306.007,69	Per 31 Desember 2016 Rp115.466.346.660,00
--	---	---

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.485.306.007,69 merupakan utang atas tunjangan profesi guru yang belum terbayar per 31 Desember 2017, utang pada BLUD dan utang atas kelebihan

pembayaran pajak. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 68Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016

N o	SKPD	TAHUN 2017	TAHUN 2016	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN (TUNJANGAN PENGHASILAN GURU)	27.683.750, 00	130.534.984,0 0	(102.851.234,00)
2	KAS DI FKTP	4.324.552, 04	-	4.324.552,04
3	KAS PROLANIS (BLUD)	10.958.000, 00	-	10.958.000,00
4	UTANG ATAS KELEBIHAN SALUR DBH	-	115.335.811.676,0 0	(115.335.811.676,00)
5	UTANG ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	77.149.288,00	-	77.149.288,00
6	Utang Jaminan Reklame	1.988.735.417,65,	-	1.988.735.417,65
7	Utang Jaminan Rusunawa	376.455.000,00	-	376.455.000,00
JUMLAH		2.485.306.007,69	115.466.346.660,00	(112.981.040.652,31)

5.5.6EKUITAS

Per 31 Desember 2017
Rp7.810.087.982.897,83

Per 31 Desember 2016
Rp7.530.256.161.697,46

Ekuitas sebesar Rp7.810.087.982.897,83terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 69Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016

D.

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Ekuitas	7.810.087.982.897,83	7.530.256.161.697,46	289.018.592.091,66
	Jumlah	7.810.087.982.897,83	7.530.256.161.697,46	289.018.592.091,66

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatanLO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah yang akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut :

5.6PENDAPATAN - LO

Per 31 Desember 2017
1.957.465.416.449,90

Per 31 Desember 2016
2.096.327.779.852,72

Merupakan pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 70Pendapatan LO TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	671.575.084.198,40	597.346.036.469,58	74.229.047.728,82
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.283.402.278.368,00	1.353.752.214.205,0	(70.349.935.837,00)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
			0	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2.488.053.883,50	145.229.529.178,14	(142.741.475.294,64)
	Jumlah	1.957.465.416.449,90	2.096.327.779.852,72	(138.862.363.402,82)

5.6.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Per 31 Desember 2017

671.575.084.198,40

Per 31 Desember 2016

597.346.036.469,58

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp671.575.084.198,40 yang terdiri dari:

Tabel 5. 71Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	483.118.162.347,84	437.836.661.634,20	45.281.500.713,64
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	58.517.658.673,71	43.720.449.893,05	14.797.208.780,66
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	28.040.851.815,93	16.907.554.147,14	11.133.297.668,79
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	101.898.411.360,92	98.881.370.795,19	3.017.040.565,73
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	671.575.084.198,40	597.346.036.469,58	74.229.047.728,82

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dan yang mempengaruhinya, yaitu :

5.6.1.1

Pendapatan Pajak Daerah – LO

Per 31 Desember 2017

483.118.162.347,84

Per 31 Desember 2016

437.836.661.634,20

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp483.118.162.347,84dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2017 dan 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	483.118.162.347,84	437.836.661.634,20	45.281.500.713,64
Pajak Hotel - LO	46.560.078.735,00	41.667.189.451,95	4.892.889.283,05
Pajak Restoran - LO	66.674.535.225,00	60.151.626.985,28	6.522.908.239,72
Pajak Hiburan - LO	22.020.976.976,00	20.116.971.323,00	1.904.005.653,00
Pajak Reklame - LO	8.464.116.585,39	8.506.255.804,63	(42.139.219,24)
Pajak Penerangan Jalan - LO	104.254.391.991,00	102.508.651.033,74	1.745.740.957,26
Pajak Parkir - LO	17.548.547.130,00	14.568.080.749,00	2.980.466.381,00
Pajak Air Tanah - LO	2.244.512.869,20	2.459.288.030,60	(214.775.161,40)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	46.517.000,00	24.740.551,00	21.776.449,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.531.850.000,00	3.232.672.150,00	2.299.177.850,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	115.427.639.932,00	101.935.266.891,00	13.492.373.041,00

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	94.344.995.904,25	82.665.918.664,00	11.67 9.077.240,25

Keseluruhan jenis pajak daerah di atas mempengaruhi mutasi penambahan/pengurangan akun piutang pajak daerah Kota Balikpapan.

5.6.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Per 31 Desember 2017 Rp58.517.658.673,71	Per 31 Desember 2016 Rp43.720.449.893,05
--	--	--

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58.517.658.673,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2017 dan 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	58.517.658.673,71	43.720.449.893,05	15.766.5 81.569,95
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	3.752.401.727,31	4.184.686.504,79	514.8 47.689,28
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	10.390.965.110,00	8.593.941.478,00	2.876.3 25.438,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.153.132.782,19	949.550.924,98	202.9 11.857,21
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	5.895.015 .892,95	3.654.044.830,95	306.5 40.272,51
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.856.533.768,10	1.999.999.099,57	(143.46 5.331,47)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	879.725.035,17	417.488.159,28	462.2 36.875,89
Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	133.758.750,00	163.932.500,00	(30.17 3.750,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	139.171.575,00	37.048.250,00	102.1 23.325,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	695.487.200,00	187.937.080,00	507.5 50.120,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.322.161.657,88	3.602.163.114,08	1.015.0 08.150,82
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	24.450.000,00	0	24.4 50.000,00
Retribusi Terminal - LO	28.996.000,00	62.962.000,00	(33.96 6.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	337.215.350,00	363.076.000,00	(25.86 0.650,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	102.185.500,00	70.605.000,00	30.7 43.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	2.276.815.000,00	1.469.750.000,00	663.4 65.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	11.186.389.765,00	13.973.184.605,50	(2.403.99 9.340,50)
Retribusi Izin Gangguan - LO	14.968.980.792,58	3.477.754.687,14	11.835.89 7.304,44
Retribusi Izin Trayek - LO	45.354.498,49	37.238.092,68	8.11 6.405,81
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	193.878.269,04	296.239.466,08	(102.36 1.197,04)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	135.040.000,00	178.848.100,00	(43.80 8.100,00)

5.6.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	Per 31 Desember 2017 Rp28.040.851.815,93	Per 31 Desember 2016 Rp16.907.554.147,14
---	--	--

Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp28.040.851.815,93 merupakan pembagian laba (deviden) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan pada PDAM dan Bank Kaltim

5.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
Lainnya - LO	Rp101.898.411.360,92	Rp98.881.370.795,19

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp101.898.411.360,92 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 74Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2017 dan 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	101.898.411.360,9 2	98.881.370.795,1 9	321.350.873,9 0
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	44.055.200,0 0	1.387.600.000,0 0	(1.343.544.800,0 0)
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.442.442.091,5 3	2.904.711.106,9 1	(462.269.015,3 8)
Pendapatan Bunga - LO	1.608.561.624,6 0	5.871.576.358,1 4	(4.263.014.733,5 4)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	32.652.849,0 0	7.366.729,0 0	25.286.120,0 0
Pendapatan Denda Pajak - LO	3.675.351.702,0 0	11.030.945.064,6 2	(9.082.577.320,6 2)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	630.040.024,0 0	294.603.800,0 0	479.036.224,0 0
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	37.089.850,0 0	39.636.225,0 0	(2.546.375,0 0)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	22.631.578,9 5
Pendapatan BLUD - LO	75.978.271.385,8 6	64.912.084.194,0 2	11.066.187.191,8 4
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	-	(8.871.750,0 0)	8.871.750,0 0
Penggunaan Mobil Tinja - LO	-	1.750.000,0 0	(1.750.000,0 0)
Rekening Listrik Pasar - LO	10.068.525,0 0	-	10.068.525,0 0
Sewa Pemakaian Gedung - LO	-	-	(185.828.007,0 2)
Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel - LO	1.775.168.486,0 0	1.011.285.814,0 0	763.882.672,0 0
Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	11.211.215.845,0 3	11.423.156.463,5 0	(1.159.073.085,2 3)
Pendapatan Tak Terduga.	4.453.493.777,9 0	5.526.790,0 0	4.445.990.148,9 0

5.6.2 PENDAPATAN	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
TRANSFER – LO	1.283.402.278.368,00	1.353.752.214.205,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.283.402.278.368,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	817.394.319.468,00	980.013.977.812,00	(162.619.658.344,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	152.578.941.900,00	76.374.973.393,00	76.203.968.507,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	313.429.017.000,00	297.363.263.000,00	16.065.754.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	1.283.402.278.368,00	1.353.752.214.205,00	(70.349.935.837,00)

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Dari rincian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Transfer-LO menggambarkan kinerja Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.6.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	Per 31 Desember 2017 Rp817.394.319.468,00	Per 31 Desember 2016 Rp980.013.977.812,00
----------------	--	---	---

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp817.394.319.468,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 76Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LO Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Bagi Hasil Pajak	143.138.978.011,00	142.907.891.921,00	231.086.090,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	220.016.427.595,00	371.196.714.670,00	(151.180.287.075,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)	392.621.094.000,00	391.898.857.000,00	722.237.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	61.617.819.862,00	74.010.514.221,00	(12.392.694.359,00)
JUMLAH	817.394.319.468,00	980.013.977.812,00	(162.619.658.344,00)

5.6.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Per 31 Desember 2017 Rp152.578.941.900,00	Per 31 Desember 2016 Rp76.374.973.393,00
----------------	---	---	--

Merupakan pendapatan transfer yang terdiri dari Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2017.

5.6.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Per 31 Desember 2017 Rp313.429.017.000,00	Per 31 Desember 2016 Rp297.363.263.000,00
----------------	--	---	---

Untuk Tahun 2017 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebesar Rp313.429.017.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 5. 77Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun Anggaran 2017 dan 2016			
Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	313.429.017.000,00	297.363.263.000,00	16.065.754.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	261.156.517.000,00	194.322.213.000,00	66.834.304.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi-LO	52.272.500.000,00	103.041.050.000,00	(50.768.550.000,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mempengaruhi akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

5.6.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	Per 31 Desember 2017 Rp2.488.053.883,50	Per 31 Desember 2016 Rp145.229.529.178,14
-------	---	--	--

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.488.053.883,50. Pendapatan Hibah terdiri Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam program AUSAID dan Hibah Aset yang diterima oleh beberapa SKPD.

5.7	BEBAN – LO	Per 31 Desember 2017 1.642.235.691.282,21	Per 31 Desember 2016 1.942.309.077.514,72
-----	------------	--	--

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 78Beban - LO TA 2017 dan 2016				
No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Operasi	1.641.159.452.794,21	1.941.310.270.718,72	(300.150.817.924,51)
3.	Beban Transfer	1.076.238.488,00	998.806.796,00	77.431.692,00
	Jumlah Beban	1.642.235.691.282,21	1.942.309.077.514,72	(300.073.386.232,51)

5.7.1	BEBAN OPERASI – LO	Per 31 Desember 2017 1.641.159.452.794,21	Per 31 Desember 2016 1.941.310.270.718,72
-------	--------------------	--	--

Beban Operasi Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2017 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 79Rincian Beban Operasi LO TA 2017 dan TA 2016				
No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Pegawai LO	615.185.930.199,91	697.434.169.054,53	(82.248.238.854,62)
2.	Beban Persediaan LO	36.266.679.273,26	56.027.847.136,53	(19.761.167.863,27)
3.	Beban Barang dan Jasa LO	519.445.491.134,45	617.750.145.993,72	(98.304.654.859,27)
4.	Beban Pemeliharaan	41.370.193.288,00	31.266.163.942,62	10.104.029.345,38
5.	Beban Perjalanan Dinas	48.503.655.702,54	51.683.550.036,04	(3.179.894.333,50)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6.	Beban Subsidi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00
7.	Beban Hibah	67.248.807.434,00	154.990.261.901,00	(87.741.454.467,00)
8.	Beban Bantuan Sosial	117.323.700,00	433.522.400,00	(316.198.700,00)
9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	313.162.759.392,49	283.728.807.572,60	29.433.951.819,89
10.	Beban Penyisihan Piutang	(1.514.350.069,88)	25.606.071.780,79	(27.120.421.850,67)
11.	Beban Lain-lain	372.962.739,44	20.854.610.607,89	(20.481.647.868,45)
12.	Beban Kerugian dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	735.120.293,00	(735.120.293,00)
	Jumlah Beban Operasi	1.641.159.452.794,21	1.941.310.270.718,72	(300.150.817.924,51)

5.7.1.1
Beban Pegawai – LO

Per 31 Desember 2017
615.185.930.199,91

Per 31 Desember 2016
697.434.169.054,53

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp615.185.930.199,91 dan Rp697.434.169.054,53. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNSD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 80Rincian Beban Pegawai LO TA 2017 dan TA 2016

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Beban Pegawai - LO	615.185.930.199,91	697.434.169.054,53	(82.248.238.854,62)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	309.383.579.043,00	0,00	226.525.615,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	256.826.924.053,00	306.466.504.565,00	(49.639.580.512,00)
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	7.646.130.000,00	4.628.120.000,00	3.018.010.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	29.094.218.817,91	16.647.962.766,83	12.446.256.051,08
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	297.925.685,00	1.345.503.755,50	(1.047.578.070,50)
Uang Lembur - LO	3.032.653.000,00	2.450.422.000,00	582.231.000,00
Beban Pegawai Dana BOS.	8.904.499.601,00	0,00	8.904.499.601,00

Beban tambahan penghasilan PNS mempengaruhi akun utang jangka pendek lainnya yang merupakan pembayaran atas tunjangan penghasilan guru.

5.7.1.2
Beban Persediaan - LO

Per 31 Desember 2017
Rp36.266.679.273,26

Per 31 Desember 2016
Rp56.027.847.136,53

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.266.679.273,26 dan Rp56.027.847.136,53. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 81Rincian Beban Persediaan LO TA 2017 dan TA 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Persediaan	36.266.679.273,26	56.027.847.136,53	(19.761.167.863,27)
Beban Bahan Pakai Habis	18.001.146.637,00	24.876.873.374,08	(6.875.726.737,08)
Beban Persediaan Bahan/ Material	18.265.532.636,26	31.150.973.762,45	(12.885.441.126,19)

Beban persediaan mempengaruhi akun persediaan barang habis pakai pada Neraca TA 2017.

5.7.1.3 Beban Barang dan Jasa-LO

Per 31 Desember 2017
Rp519.445.491.134,45

Per 31 Desember 2016
Rp 603.866.673.212,72

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 519.445.491.134,45 dan Rp 603.866.673.212,72. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemkot Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 82Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2017 dan TA 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Barang dan Jasa	519.445.491.134,45	603.866.673.212,72	(84.421.182.078,27)
Beban Jasa Kantor	64.027.869.685,22	72.233.371.622,51	(8.205.501.937,29)
Beban Premi Asuransi	4.212.397.192,60	3.561.990.019,68	650.407.172,92
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	31.613.661.639,50	30.564.227.212,75	1.049.434.426,75
Beban Cetak dan Penggandaan	11.392.889.813,00	12.872.202.946,00	(1.479.313.133,00)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.448.956.402,57	4.339.761.155,64	(890.804.753,07)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	997.885.500,00	1.266.458.800,00	(268.573.300,00)
Beban Sewa Alat Berat	734.888.000,00	29.150.000,00	705.738.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.492.488.959,00	4.857.450.107,00	635.038.852,00
Beban Makanan dan Minuman	55.077.312.465,34	72.734.318.520,77	(17.657.006.055,43)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.327.487.250,00	1.698.071.550,00	(370.584.300,00)
Belanja Pakaian Kerja	2.606.375.830,00	2.985.160.487,00	(378.784.657,00)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.087.680.725,00	3.835.926.800,00	(2.748.246.075,00)
Beban Jasa Konsultasi	1.258.774.500,00	4.429.513.440,00	(3.170.738.940,00)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.029.929,00	11.899.010.572,00	(11.763.980.643,00)
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.413.811.136,00	0,00	7.413.811.136,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	284.330.229,00	1.642.030.000,00	(1.357.699.771,00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.053.534.282,00	5.902.641.463,33	(3.849.107.181,33)
Honorarium PNS	34.565.555.119,16	44.746.358.970,00	(10.180.803.850,84)
Honorarium Non PNS	153.592.053.330,00	169.930.952.514,00	(16.338.899.184,00)
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.295.100.000,00	6.610.915.000,00	(4.315.815.000,00)
Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu	4.016.124.232,95	3.710.089.749,00	306.034.483,95
Beban Pegawai BLUD Puskesmas	5.627.902.822,64	5.930.881.831,50	(302.979.008,86)
Beban Pegawai Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	6.628.973.028,00	6.821.232.713,13	(192.259.685,13)
Beban Barang Dana Bos	49.372.953.342,00	66.455.078.854,00	(17.082.125.512,00)
Beban Barang KAPITASI JKN	3.856.288.979,73	3.239.618.842,87	616.670.136,86
Beban Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp. 1.000.000,-	-	428.435.140,00	(428.435.140,00)
Beban Tali Asih, Santunan, Kompensasi, General Check Up	-	115.476.825,00	(115.476.825,00)
Beban Jasa Berlangganan	314.285.427,23	340.896.459,00	(26.611.031,77)
Beban Pemeriksaan Laboratorium	193.424.188,00	690.380.728,00	(496.956.540,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	2.452.101.288,00	181.730.000,00	2.270.371.288,00
Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	3.386.220.572,53	2.366.024.931,97	1.020.195.640,56
Beban Barang Perlengkapan Kantor	7.050.500,00	8.295.000,00	(1.244.500,00)
Beban Barang Perlengkapan Dapur	26.695.000,00	10.614.000,00	16.081.000,00
Beban Penyelesaian Perkara Hukum	142.000.000,00	48.450.000,00	93.550.000,00
Beban Kontribusi Lomba	50.000.000,00	58.980.000,00	(8.980.000,00)
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.246.477.390,00	2.881.909.664,00	(1.635.432.274,00)
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	9.825.283.971,00	14.162.845.238,00	(4.337.561.267,00)

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	2.815.447.075,51	2.366.332.867,09	449.114.208,42
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	2.146.138.450,00	1.932.985.650,00	213.152.800,00
Beban bahan Perlengkapan Kamar	-	14.073.400,00	(14.073.400,00)
Beban Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	6.820.000,00	4.598.000,00	2.222.000,00
Beban Jasa Perizinan	4.748.592,00	4.748.592,00	-
Beban Barang Alat Kesehatan	33.219.000,00	0,00	33.219.000,00
Beban Kerjasama RSUD	-	1.184.007.204,00	(1.184.007.204,00)
Beban Tim Pemandu Haji Daerah	106.601.800,00	75.167.016,00	31.434.784,00
Beban Barang Perangkat Lunak	-	10.655.000,00	(10.655.000,00)
Beban Pegawai Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	60.432.000,00	0,00	60.432.000,00
Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD	27.937.679.977,37	18.361.492.353,00	9.576.187.624,37
Beban Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	15.570.541.510,10	16.322.161.973,48	(751.620.463,38)

5.7.1.4

Beban Pemeliharaan- LO

Per 31 Desember 2017
Rp41.370.193.288,00

Per 31 Desember 2016
Rp31.266.163.942,62

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp41.370.193.288,00 dan Rp31.266.163.942,62. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

5.7.1.5

Beban Perjalanan Dinas- LO

Per 31 Desember 2017
Rp48.503.655.702,54

Per 31 Desember 2016
Rp51.683.550.036,04

Beban Perjalanan Dinas tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp48.503.655.702,54 dan Rp51.683.550.036,04. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

5.7.1.6

Beban Subsidi - LO

Per 31 Desember 2017
Rp1.000.000.000,00

Per 31 Desember 2016
Rp800.000.000,00

Beban Subsidi tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp800.000.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mensubsidi Operasional Bus Sekolah yang dikelola Perusda Kota Balikpapan

5.7.1.7

Beban Hibah - LO

Per 31 Desember 2017
Rp67.248.807.434,00

Per 31 Desember 2016
Rp154.990.261.901,00

Jumlah Beban Hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2017 sebesar Rp67.248.807.434,00 yang terdiri atas beban hibah untuk Kelompok, Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar. Rincian beban hibah Tahun 2017 dan 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 83Rincian Beban hibah TA 2017 dan TA 2016

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Hibah	67.248.807.434,00	154.990.261.901,00	(87.741.454.467,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	8.113.650.000,00	18.019.375.000,00	(9.905.725.000,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	33.717.516.035,00	100.889.603.758,00	(67.172.087.723,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	25.417.641.399,00	36.081.283.143,00	(10.663.641.744,00)

5.7.1.8	Beban Bantuan Sosial - LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp117.323.700,00	Rp433.522.400,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp117.323.700,00 dan Rp433.522.400,00. Beban tersebut merupakan beban untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

5.7.1.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp313.162.759.392,49	Rp283.728.807.572,60

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp313.162.759.392,49dan Rp283.728.807.572,60. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

5.7.1.10	Beban Penyisihan Piutang - LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp(1.514.350.069,88)	Rp25.606.071.780,79

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp(1.514.350.069,88) dan Rp25.606.071.780,79 merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 84Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2017 dan TA 2016			
Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Penyisihan Piutang	(1.514.350.069,88)	25.606.071.780,79	(27.120.421.850,67)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	(557.632.227,48)	22.215.068.065,21	(22.772.700.292,69)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(956.717.842,40)	3.391.003.715,58	(4.347.721.557,98)

Beban penyisihan piutang pendapatan terdiri atas beban penyisihan piutang pajak, retribusi, tranfer pemerintah dan piutang lainnya.

5.7.1.11	Beban Lain-lain- LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp3.245.154.826,84	Rp20.854.610.607,89

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.245.154.826,84 dan Rp20.854.610.607,89 . Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap (dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi) dan beban penyisihan investasi dana bergulir. Rincian beban lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 85Rincian Beban Lain-lain TA 2017 dan TA 2016			
Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Lain-lain	372.962.739,44	20.854.610.607,89	(20.481.647.868,45)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	8.696.467,25	506.019.409,40	(497.322.942,15)
Beban Lain-lain	364.266.272,19	20.348.591.198,49	(19.984.324.926,30)

5.7.1.1	Beban Kerugian dari	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
2	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Rp0.00	Rp735.120.293,00

Beban Kerugian dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2017 sebesar Rp0.00 merupakan beban untuk mencatat kerugian atas investasi pada Perusda Kota Balikpapan per 31 Desember 2017.

5.7.2.	Beban Transfer - LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp1.076.238.488,00	Rp998.806.796,00

Jumlah Beban Transfer Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.076.238.488,00 dan Rp998.806.796,00. Beban transfer merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi Partai Politik pada Tahun Anggaran 2017.

5.8	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp(708.039.038,00)	Rp(4.571.839.650,76)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 adalah sebesar Rp(708.039.038,00) dan Tahun 2016 sebesar Rp(4.571.839.650,76) yang diperoleh dari penghapusan aset tetap yang dilakukan selama periode Tahun 2017

5.9	Pos Luar Biasa	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp (177.850.000,00)	Rp7.826.286.941,06

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp (177.850.000,00) dan Rp7.826.286.941,06.

5.9.1	SURPLUS/DEFISIT - LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp314.343.836.129,69	Rp157.273.149.628,30

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban, Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp314.343.836.129,69 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada tahun 2016 sebesar Rp157.070.686.501,39

E. LAPORAN ARUS KAS

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

5.8	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		564.618.895.713,58	440.549.463.308,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp564.618.895.713,58 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp1.873.467.631.378,01 dan arus keluar kas sebesar Rp1.308.848.735.664,43

Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 86Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian		Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk:				
-	Pendapatan Pajak Daerah	450.213.740.232,52	403.690.047.708,65	46.523.692.523,87
-	Pendapatan Retribusi Daerah	47.563.009.260,52	46.624.692.440,79	938.316.819,73
-	Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.163.120.190,93	15.051.835.627,69	111.284.563,24
-	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	98.810.811.326,04	93.610.857.899,16	5.199.953.426,88
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	143.138.978.011,00	142.907.891.921,00	231.086.090,00
-	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	220.016.427.595,00	457.744.385.992,00	(237.727.958.397,00)
-	Pendapatan Dana Alokasi Umum	392.621.094.000,00	391.898.857.000,00	722.237.000,00
-	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	61.617.819.862,00	74.010.514.221,00	(12.392.694.359,00)
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	152.578.941.900,00	76.374.378.915,00	76.204.562.985,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	237.077.189.000,00	181.980.819.000,00	55.096.370.000,00
-	Dana Hibah	2.394.000.000,00	5.070.000.000,00	(2.676.000.000,00)
-	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi	52.272.500.000,00	103.041.050.000,00	(50.768.550.000,00)
	Jumlah	1.873.467.631.378,01	1.992.004.585.506,29	(118.537.699.347,28)
Arus Kas Keluar:				
-	Belanja Pegawai	574.721.273.231,75	709.143.921.418,53	(134.422.648.186,78)
-	Belanja Barang dan Jasa	664.507.242.810,68	696.574.344.801,76	(32.067.101.991,08)
-	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00
-	Belanja Hibah	67.248.807.434,00	142.574.661.901,00	(75.325.854.467,00)
-	Bantuan Sosial	117.323.700,00	433.522.400,00	(316.198.700,00)
-	Bantuan Keuangan	1.076.238.488,00	998.806.796,00	77.431.692,00
-	Belanja Tidak Terduga	177.850.000,00	930.610.100,00	(752.760.100,00)
	Jumlah	1.308.848.735.664,43	1.551.455.867.417,29	(242.607.131.752,86)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		564.618.895.713,58	440.549.463.308,00	124.069.432.405,58

Jumlah arus kas masuk pada aktivitas operasi berbeda dengan realisasi pendapatan di LRA karena penjualan aset tetap sebesar Rp499.359.980,00 yang tercatat pada Lain-lain PAD yang Sahdisajikan ke dalam arus kas aktivitas investasi .

5.9 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Per 31 Desember 2017 **Rp(451.392.196.111,42)** Per 31 Desember 2016 **Rp(562.872.262.371,54)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar Rp(451.392.196.111,42) yang didapat selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar Rp499.359.980,00 dengan jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal sebesar Rp451.891.556.091,42.

5.10 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2017 **Rp(17.560.935.578,00)** Per 31 Desember 2016 **Rp(3.000.000.000,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp(17.560.935.578,00) menunjukkan tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas sebesar Rp17.560.935.578,00 digunakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Kota Balikpapan dan Bankaltimtara cabang Balikpapan.

5.11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2017 **Rp0,00** Per 31 Desember 2016 **Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 masing masing sebesar Rp23.883.752.864,00

Dari arus kas bersih masing-masing aktivitas diatas dapat dihitung kenaikan/penurunan kas selama periode tahun 2017 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	564.618.895.713,58	440.549.463.308,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(451.392.196.111,42)	(562.872.262.371,54)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.560.935.578,00)	(3.000.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	95.665.764.024,16	(125.322.799.063,54)
Saldo Awal Kas di BUD & Pengeluaran	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09
Saldo Akhir Kas di BUD & Pengeluaran	198.234.445.532,71	102.568.681.508,55
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	152.086.042.210,57	67.388.111.428,50
Pengeluaran	0,00	117.347.911,00
Penerimaan	89.615.400,00	15.052.219,00
Kas di BLUD dan JKN	47.067.800.154,14	37.068.502.864,49
Saldo Akhir Kas	199.243.457.764,71	104.589.014.422,99

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.14.1	EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		7.530.256.161.697,46	6.790.306.381.510,21

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp7.530.256.161.697,46 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2016

5.14.2	SURPLUS /(DEFISIT) LO	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		314.343.836.129,69	157.273.149.628,30

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp314.343.836.129,69. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.14.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
		Rp(34.512.014.929,32)	Rp582.676.630.558,95

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5. 87Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
1.	Koreksi atas Pendapatan	245.000,69	0.00
2.	Koreksi Penyajian Aset Tetap Tahun Lalu	(14.236.098.922,14)	534.400.325.665,51
3.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	8.012.131.311,90	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	39.676.734.905,10	29.777.046.613,27
5	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	0.00	18.499.258.280,17

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
6	Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya	(67.965.027.224,87)	0.00
	Jumlah	(34.512.014.929,32)	582.676.630.558,95

5.12

EKUITAS AKHIR

Per 31 Desember 2017

Rp7.810.087.982.897,83

Per 31 Desember 2016

Rp7.530.256.161.697,46

Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar Rp 7.810.087.982.897,83 jika dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2016 sebesar Rp7.530.256.161.697,46 mengalami kenaikan sebesar Rp 279.831.821.200,37

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

G. KEWAJIBAN KONTIJENSI ATAS KASUS HUKUM

Pemerintah Kota Balikpapan memiliki beberapa aset tetap dalam sengketa hukum yang dalam putusannya dimenangkan penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap (incraht), namun masih dalam proses penghapusan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan poin No. 5.5.1.4.5, yaitu aset sebagai berikut:

1. Tanah Taman Bekapai (Eks. Lapangan Veteran), luas 4.800 M² senilai Rp12.000.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 592 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Januari 2003 yang amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yakni Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Tanah Pasar Blauran dan sebagian Pasar Ikan Klandasan seluas 270.96 M² senilai Rp40.644.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 2204K/Pdt/2007 tanggal 2 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 639 PK/Pdt/2010 tanggal 11 April 2011. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan SP2D untuk pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp30.000.000.000,-

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca Daerah
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berprinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SAP.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2017 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SAYID MN FADLI